



LAPORAN KEUANGAN KECAMATAN JABON

TAHUN 2023

UNAUDITED





PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN JABON
Jln. Mojopahit Nomor : 1 Telp. 0343 -
852008
J A B O N

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kecamatan Jabon Tahun 2023 Kabupaten Sidoarjo yang terdiri dari (I) Laporan Realisasi Anggaran; (II) Neraca; (III) Laporan Operasional; (IV) Laporan Perubahan Ekuitas; (V) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2023 sebagaimana terlampir, adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi Pelaksanaan Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sidoarjo, 15 Januari 2024

Pengguna Anggaran



DEDIK IRWANTO, S.Sos

NIP. 19691003 198910 1 001

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Kami atas nama Kecamatan Jabon yang berada di lingkup Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyajikan Laporan Keuangan Kecamatan Jabon Tahun 2023, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Sidoarjo.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 189 sampai dengan Pasal 193, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku entitas akuntansi. Laporan keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) sebagai entitas akuntansi yang paling sedikit meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas, dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023 Kecamatan Jabon Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga menyajikan informasi keuangan yang lengkap dan akuntabel.

Laporan Keuangan Tahun 2023 Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan Kabupaten Sidoarjo untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Kecamatan Jabon Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyampaian Laporan Keuangan ini masih terdapat kekurangan, untuk itu tetap mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna (*stakeholders*) laporan keuangan ini. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan terus-menerus berupaya untuk menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*).



RINGKASAN

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Keuangan Pokok Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Selain itu, Laporan Keuangan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 ini juga menginformasikan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, khususnya Kecamatan Jabon untuk menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK.

Laporan Keuangan Kecamatan Jabon Pemerintah Daerah Sidoarjo Tahun 2023 merupakan gabungan laporan keuangan entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang ada di wilayah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sehingga menyajikan informasi keuangan pada pengelolaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo. Berikut adalah ringkasan Laporan Keuangan Kecamatan Jabon Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023.

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Jabon menggambarkan perbandingan antara Anggaran Tahun 2023 dengan Realisasinya.

Nilai realisasi Belanja Daerah sampai dengan periode 31 Desember 2023 sebesar Rp4.302.608.727,00 mengalami penurunan sebesar Rp50.942.460,00 atau 1,17% jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp4.353.551.187,00

Nilai realisasi Belanja Operasi sampai dengan periode 31 Desember 2023 sebesar Rp4.198.268.727,00 mengalami penurunan sebesar Rp102.342.665,00 atau 2,38% jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp4.300.611.392,00

Nilai realisasi Belanja Modal sampai dengan periode 31 Desember 2023 sebesar Rp104.340.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp51.400.205,00 atau 97,09% jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp52.939.795,00

2. Neraca

Neraca, menyajikan informasi tentang posisi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Kecamatan Jabon per 31 Desember 2023.

Nilai Aset pada per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.742.495.364,84 mengalami penurunan sebesar Rp126.409.414,14 atau 3,27% jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp3.868.904.778,98.

Nilai Kewajiban pada per 31 Desember 2023 sebesar Rp95.029.130,00 mengalami penurunan sebesar Rp29.080.808,00 atau 23,43% jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp124.109.938,00.

Nilai Ekuitas pada per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.047.403.567,98 mengalami kenaikan sebesar Rp4.302.608.727,00 atau 114,90% jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp3.744.794.840,98.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional, menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional.

Nilai Beban Daerah sampai dengan periode 31 Desember 2023 sebesar Rp4.399.937.333,14 mengalami penurunan sebesar Rp102.163.049,37 atau 2,27% jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp4.502.100.382,51.

Nilai surplus/(defisit) dari KEGIATAN OPERASIONAL sebesar (Rp4.399.937.333,14)

Nilai surplus/(defisit) dari KEGIATAN NON OPERASIONAL sebesar Rp0,00

Nilai surplus/(defisit) dari POS LUAR BIASA sebesar Rp0,00

Sehingga menghasilkan nilai SURPLUS/(DEFISIT)-LO sebesar (Rp4.399.937.333,14)

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas, menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Tahun pelaporan.

EKUITAS AWAL tahun 2023 adalah sebesar (Rp608,756,346.02)

SURPLUS/DEFISIT LO tahun 2023 adalah sebesar (Rp4,399,937,333.14)

RK PPKD tahun 2023 adalah sebesar Rp4,302,608,727.00

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR: tahun adalah sebesar Rp0.00.

EKUITAS AKHIR tahun 2023 adalah sebesar (Rp706,084,952.16).

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang Kebijakan Fiskal, Kebijakan Akuntansi, dan Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan, Daftar Rincian atau Nilai Pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN	1
DAFTAR ISI	1
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	1
NERACA	1
LAPORAN OPERASIONAL	1
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	1
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	1
BAB I PENDAHULUAN	9
1.1 Latar Belakang	9
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	10
1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	10
1.4 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.....	11
1.5 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	13
BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KEUANGAN	15
2.1 Pencapaian Target Keuangan menurut Urusan Pemerintahan	15
2.2 Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah	16
BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI	19
3.1 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	19
3.2 Kebijakan Akuntansi Akun	19
BAB IV PENJELASAN POS LAPORAN KEUANGAN	35
4.1 Penjelasan Pos Laporan Realisasi Anggaran	35
4.2 Penjelasan Pos Neraca	50
4.1 Penjelasan Pos Laporan Operasional	71
4.2 Penjelasan Pos Laporan Perubahan Ekuitas	86
BAB V PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN	87
4.1 Kondisi Internal yang Berpengaruh Pada Laporan Keuangan Tahun 2023.....	87
BAB VI PENUTUP	90
LAMPIRAN	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

SKPD KECAMATAN JABON

Per 31 Desember 2023

Kode	Nama	Anggaran	Realisasi	Selisih
4	Pendapatan			0,00
41	Pendapatan Asli Daerah			0,00
410101	Pendapatan Pajak Daerah			0,00
410201	Pendapatan Retribusi Daerah			0,00
410301	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			0,00
410401	Lain-lain PAD yang Sah			0,00
42	Pendapatan Transfer			0,00
<i>4201</i>	<i>Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan</i>			<i>0,00</i>
420101	Dana Bagi Hasil Pajak			0,00
420102	Dana Hasil Sumber Daya Alam			0,00
420103	Dana Alokasi Umum			0,00
420104	Dana Alokasi Khusus			0,00
<i>4202</i>	<i>Transfer Pemerintah Pusat Lainnya</i>			<i>0,00</i>
420201	Dana Otonomi Khusus			0,00
420202	Dana Penyesuaian			0,00
<i>4203</i>	<i>Transfer Pemerintah Provinsi</i>			<i>0,00</i>
420301	Pendapatan Bagi Hasil Pajak			0,00
420302	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya			0,00
420303	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Lainnya			0,00
43	Lain-lain Pendapatan yang Sah			0,00
430101	Pendapatan Hibah			0,00
430201	Pendapatan Dana Darurat			0,00
<i>4303</i>	<i>Pendapatan Lainnya</i>			<i>0,00</i>
430301	Penjualan atas Tanah			0,00
430302	Penjualan atas Peralatan dan Mesin			0,00
430303	Penjualan atas Gedung dan Bangunan			0,00
430304	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan			0,00
430305	Penjualan Aset Tetap Lainnya			0,00
430306	Penjualan Aset Lainnya			0,00
430307	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen			0,00
430308	Pendapatan Lainnya			0,00
5	Belanja	5.030.563.270,00	4.302.608.727,00	727.954.543,00
51	Belanja Operasi	4.915.913.090,00	4.198.268.727,00	717.644.363,00
510101	Belanja Pegawai	2.796.539.657,00	2.530.822.010,00	265.717.647,00
510201	Belanja Barang	2.119.373.433,00	1.667.446.717,00	451.926.716,00
510301	Bunga			0,00

510401	Subsidi			0,00
510501	Hibah			0,00
510601	Bantuan Sosial			0,00
52	Belanja Modal	114.650.180,00	104.340.000,00	10.310.180,00
520101	Belanja Tanah			0,00
520201	Belanja Peralatan dan Mesin	114.650.180,00	104.340.000,00	10.310.180,00
520301	Belanja Gedung dan Bangunan			0,00
520401	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan			0,00
520501	Belanja Aset Tetap Lainnya			0,00
520601	Belanja Aset Lainnya			0,00
53	Belanja Tak Terduga			0,00
530101	Belanja Tak Terduga			0,00
54	Transfer			0,00
5401	<i>Transfer Bagi Hasil ke Desa</i>			0,00
540101	Bagi Hasil Pajak			0,00
540102	Bagi Hasil Retribusi			0,00
540103	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya			0,00
540201	Belanja Bantuan Keuangan			0,00
Surplus/Defisit		(5.030.563.270,00)	(4.302.608.727,00)	(727.954.543,00)
6	Penerimaan Pembiayaan			0,00
61	Penerimaan Pembiayaan			0,00
610101	Penggunaan SILPA			0,00
610201	Pencairan Dana Cadangan			0,00
610301	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			0,00
610401	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat			0,00
610501	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya			0,00
610601	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank			0,00
610701	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Bukan Bank			0,00
610801	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi			0,00
610901	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya			0,00
611001	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara			0,00
611101	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah			0,00
611201	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya			0,00
611301	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat			0,00
7	Pengeluaran Pembiayaan			0,00
72	Pengeluaran Pembiayaan			0,00
720101	Pembentukan Dana Cadangan			0,00
720201	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah			0,00
720301	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat			0,00

720401	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya			0,00
720501	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank			0,00
720601	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank			0,00
720701	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi			0,00
720801	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya			0,00
720901	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara			0,00
721001	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah			0,00
721101	Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya			0,00
721201	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen			0,00
Surplus/Defisit Pembiayaan				0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		(5.030.563.270,00)	(4.302.608.727,00)	(727.954.543,00)

Sidoarjo, 15 Januari 2024
PENGUCAPAN ANGGARAN

DEDIK IRWANTO, S.Sos
 Pembina
 NIP. 19691003 198910 1 001

NERACA
SKPD KECAMATAN JABON
Per 31 Desember 2023

Kode	Nama	Tahun	Tahun -1
Aktiva		3.742.495.364,84	3.868.904.778,98
1	Aset	3.742.495.364,84	3.868.904.778,98
11	Aset Lancar	1.445.137,00	3.677.063,00
110101	Kas di Kas Daerah	0,00	0,00
110201	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
110202	Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00
110301	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
110302	Kas di BLUD	0,00	0,00
110303	Kas Lainnya	933.337,00	0,00
110401	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
110501	Piutang Pajak	0,00	0,00
110601	Piutang Retribusi	0,00	0,00
110701	Penyisihan Piutang	0,00	0,00
110801	Belanja Dibayar Dimuka	0,00	0,00
110901	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00
111001	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00
111101	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
111201	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
111301	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
111401	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00
111501	Piutang Lainnya	0,00	0,00
111601	Persediaan	511.800,00	3.677.063,00
12	Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
<i>1201</i>	<i>Investasi Nonpermanen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
120101	Pinjaman Jangka Panjang	0,00	0,00
120102	Investasi Surat Utang Negara	0,00	0,00
120103	Investasi Proyek Pembangunan	0,00	0,00
120104	Investasi Nonpermanen Lainnya	0,00	0,00
<i>1202</i>	<i>Investasi Permanen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
120201	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
120202	Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
13	Aset Tetap	3.813.372.056,69	3.863.118.915,98
130101	Tanah	1.439.615.100,00	1.439.615.100,00
130201	Peralatan dan Mesin	3.013.844.994,00	2.711.023.317,00
130301	Gedung dan Bangunan	3.953.213.302,00	3.953.213.302,00
130401	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	65.099.500,00	65.099.500,00
130501	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00

130601	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
130701	Akumulasi Penyusutan	(4.658.400.839,31)	(4.305.832.303,02)
14	Dana Cadangan	0,00	0,00
140101	Dana Cadangan	0,00	0,00
15	Aset Lainnya	2.108.800,00	2.108.800,00
150101	Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
150201	Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00
150301	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
150401	Aset Tak Berwujud	0,00	0,00
150501	Aset Lain-Lain	188.776.650,00	188.776.650,00
150601	Akumulasi Amortisasi	(186.667.850,00)	(186.667.850,00)
16	RK SKPD	(74.430.628,85)	0,00
160101	RK SKPD	(74.430.628,85)	0,00
Pasiva		3.742.495.364,84	3.868.904.778,98
2	Kewajiban	95.029.130,00	124.109.938,00
21	Kewajiban Jangka Pendek	95.029.130,00	124.109.938,00
210101	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
210201	Utang Bunga	0,00	0,00
210301	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
210401	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
210501	Utang Belanja	95.029.130,00	124.109.938,00
210601	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
22	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
220101	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	0,00	0,00
220201	Utang Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00
220301	Premium (Diskon) Obligasi	0,00	0,00
220401	Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
3	Ekuitas	3.647.466.234,84	3.744.794.840,98
31	Ekuitas	3.647.466.234,84	3.744.794.840,98
310101	Ekuitas	3.744.794.840,98	(608.756.346,02)
310201	Surplus/Defisit LO	(4.399.937.333,14)	0,00
3103	Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	4.302.608.727,00	4.353.551.187,00
310301	RK PPKD	4.302.608.727,00	4.353.551.187,00

Sidoarjo, 15 Januari 2024

PENGGUNA ANGGARAN



DEDIK IRWAN TO, S.Sos

Pembina

NIP. 19691003 198910 1 001

LAPORAN OPERASIONAL
SKPD KECAMATAN JABON
Per 31 Desember 2023

Kode	Nama	Tahun Ini
8	<i>Pendapatan</i>	0,00
8101	<i>Pendapatan Asli Daerah</i>	0,00
810101	Pendapatan Pajak Daerah	0,00
810102	Pendapatan Retribusi Daerah	0,00
810103	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00
810104	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	0,00
8102	<i>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</i>	0,00
810201	Dana Bagi Hasil Pajak	0,00
810202	Dana Hasil Sumber Daya Alam	0,00
810203	Dana Alokasi Umum	0,00
810204	Sana Alokasi Khusus	0,00
8103	<i>Transfer Pemerintah Pusat Lainnya</i>	0,00
810301	Dana Otonomi Khusus	0,00
810302	Dana Penyesuaian	0,00
8104	<i>Transfer Pemerintah Provinsi</i>	0,00
810401	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	0,00
810402	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00
810403	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Lainnya	0,00
8105	<i>Lain-lain Pendapatan yang Sah</i>	0,00
810501	Pendapatan Hibah	0,00
810502	Pendapatan Dana Darurat	0,00
810503	Pendapatan Lainnya	0,00
9	<i>Beban</i>	4.399.937.333,14
910101	Beban Pegawai	2.500.715.127,00
910201	Beban Persediaan	197.903.206,00
910301	Beban Jasa	1.050.844.535,00
910401	Beban Pemeliharaan	248.236.017,00
910501	Beban Perjalanan Dinas	173.720.960,00
910601	Beban Bunga	0,00
910701	Beban Subsidi	0,00
910801	Beban Hibah	0,00
910901	Beban Bantuan Sosial	0,00
911001	Beban Penyusutan	228.517.488,14
911101	Beban Amortisasi	0,00
911201	Beban Transfer	0,00
911301	Beban Lain-lain	0,00
911401	Beban Penyisihan Piutang	0,00
SURPLUS/(DEFISIT) KEGIATAN OPERASIONAL		(4.399.937.333,14)
8	<i>SURPLUS</i>	0,00

820101	Surplus Penjualan Aset Nonlancar	0,00
820201	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00
820301	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00
9	DEFISIT	0,00
920101	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	0,00
920201	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00
920301	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00
SURPLUS/(DEFISIT) KEGIATAN NON OPERASIONAL		0,00
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		(4.399.937.333,14)
8	SURPLUS	0,00
830101	Pendapatan Luar Biasa	0,00
9	DEFISIT	0,00
930101	Beban Luar Biasa	0,00
SURPLUS/(DEFISIT) POS LUAR BIASA		0,00
SURPLUS/(DEFISIT)-LO		(4.399.937.333,14)

Sidoarjo, 15 Januari 2024
KECAMATAN ANGGARAN

DEDIK IWANTO, S.Sos
 Pembina
 NIP. 19691003 198910 1 001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
SKPD KECAMATAN JABON
Per 31 December 2023

Uraian LPE	2023
EKUITAS AWAL	3.744.794.840,98
SURPLUS/DEFISIT LO	(4.399.937.333,14)
RK PPKD	4.302.608.727,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	0,00
KOREKSI NILAI PIUTANG	0,00
KOREKSI NILAI PENYISIHAN PIUTANG	0,00
KOREKSI BEBAN DIBAYAR DIMUKA	0,00
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00
KOREKSI INVESTASI & DANA CADANGAN	0,00
KOREKSI ASET TETAP	0,00
KOREKSI ASET TAK BERWUJUD	0,00
KOREKSI ASET LAIN LAIN	0,00
KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP	0,00
KOREKSI AMORTISASI	0,00
KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAIN LAIN	0,00
KOREKSI PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA	0,00
KOREKSI UTANG	0,00
RK SKPD	0,00
EKUITAS AKHIR	3.647.466.234,84

Sidang, 15 Januari 2024
PENGUNTA ANGGARAN

DEDIK IRWAN TO, S.Sos
Bendahara
NIP. 19691003 198910 1 001

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berasaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan output.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pengguna anggaran, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah maka kepala daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan Daerah yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih Tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya.
3. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
4. Laporan Operasional
Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
5. Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas pada tanggal pelaporan.
6. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. CaLK meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan dengan posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional Pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023 menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan pelaporan yang bermanfaat bagi para pemakai dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, dan politik dengan cara:

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumberdaya ekonomi dan alokasinya sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang digunakan untuk kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah tercapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah membiayai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Hal-hal dimaksud dapat dilihat dari posisi pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

1. Undang Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja OPD Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Bupati Nomor 125 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Sidoarjo;
18. Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

1.4. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terdiri dari Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). SKPKD adalah BPKAD, sedangkan BLUD adalah 30 Puskesmas, RSUD Sidoarjo, RSUD Sidoarjo Barat, dan TPA Griyo Mulyo Jabon.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan serta mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas Akuntansi sebanyak 47 OPD, terdiri dari 6 Badan, 19 Dinas, 2 Sekretariat, Inspektorat, Satpol PP dan 18 Kecamatan.

6 (Enam) badan terdiri dari:

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
4. Badan Pelayanan Pajak Daerah;
5. Badan Kepegawaian Daerah;
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

19 (Sembilan belas) dinas terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air;
4. Dinas Perumahan, Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang;
5. Dinas Sosial;
6. Dinas Tenaga Kerja;
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana;
8. Dinas Pangan dan Pertanian;
9. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
10. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
12. Dinas Perhubungan;
13. Dinas Komunikasi dan Informatika;
14. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
18. Dinas Perikanan;
19. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

2 (Dua) sekretariat terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;

18 (Delapan belas) kecamatan terdiri dari:

1. Kecamatan Sidoarjo;
2. Kecamatan Candi;
3. Kecamatan Buduran;
4. Kecamatan Wonoayu;
5. Kecamatan Krian;
6. Kecamatan Porong;
7. Kecamatan Krembung;
8. Kecamatan Jabon;

9. Kecamatan Balongbendo;
10. Kecamatan Tarik;
11. Kecamatan Taman;
12. Kecamatan Waru;
13. Kecamatan Gedangan;
14. Kecamatan Sedati;
15. Kecamatan Tanggulangin;
16. Kecamatan Tulangan;
17. Kecamatan Prambon;
18. Kecamatan Sukodono.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) terdapat pada OPD:

1. Sekretariat Daerah;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
4. Kecamatan Sidoarjo;
5. Kecamatan Porong;
6. Kecamatan Krian;
7. Kecamatan Taman.

1.5. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika dalam penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan adalah:

1. Pendahuluan

Memuat penjelasan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi, dan sistematika isi catatan atas laporan keuangan.

2. Kebijakan Fiskal/Keuangan dan Ekonomi Makro

Ekonomi makro yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan APBD, serta perubahan anggaran yang dilakukan. Kebijakan keuangan menyajikan informasi mengenai kebijakan keuangan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Indikator pencapaian target kinerja APBD, menyajikan informasi tentang indikator pencapaian target kinerja APBD.

3. Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, memuat realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi dari target kinerja keuangan. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

4. Kebijakan Akuntansi

Entitas pelaporan keuangan daerah, memuat informasi tentang entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan, penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

5. Penjelasan Pos Laporan Keuangan

Rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan, pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, sisa lebih anggaran, pendapatan dan beban operasional, arus kas, perubahan ekuitas dan pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.

6. Penutup

Penutup memuat informasi mengenai Rincian Perhitungan SiLPA dan pernyataan bahwa Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 telah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan prinsip penyajian paripurna (*full disclosure*).

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KEUANGAN

2.1 Pencapaian Target Keuangan menurut Urusan Pemerintahan

Pencapaian target keuangan menurut urusan pemerintahan bisa dilihat dari dua sisi yaitu pendapatan dan belanja.

Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Sumber Dana	Lokasi	Penjelasan
5101	Belanja Pegawai	2.796.539.657,00	2.530.822.010,00	90,50%	APBD	Sidoarjo	
5102	Belanja Barang dan Jasa	2.119.373.433,00	1.667.446.717,00	78,68%	APBD	Sidoarjo	
5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	114.650.180,00	104.340.000,00	91,01%	APBD	Sidoarjo	

2.1.1 Pencapaian Target Pendapatan menurut Urusan Pemerintahan

Pencapaian target keuangan dari realisasi pendapatan daerah sesuai dengan pembagian urusan dan organisasi adalah sebagai berikut:

Klasifikasi Pendapatan Menurut Organisasi

Kode SKPD	SKPD	Kode Akun	Nama	Anggaran	Realisasi	Realisasi -1

2.1.2 Pencapaian Target Belanja menurut Urusan Pemerintahan

Pencapaian target keuangan dari realisasi belanja daerah sesuai dengan pembagian urusan dan organisasi adalah sebagai berikut:

Klasifikasi Belanja Menurut Organisasi

Kode SKPD	SKPD	Kode Akun	Nama	Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
7010800	Kecamatan Jabon	510101	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.194.271.425,00	1.151.304.163,00	1.055.351.650,00
7010800	Kecamatan Jabon	510102	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.466.808.232,00	1.252.349.847,00	1.268.493.270,00

7010800	Kecamatan Jabon	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	135.460.000,00	127.168.000,00	129.578.000,00
7010800	Kecamatan Jabon	510201	Belanja Barang	263.084.294,00	195.671.280,00	259.256.850,00
7010800	Kecamatan Jabon	510202	Belanja Jasa	1.353.489.656,00	1.049.818.460,00	976.674.765,00
7010800	Kecamatan Jabon	510203	Belanja Pemeliharaan	288.248.000,00	248.236.017,00	467.506.657,00
7010800	Kecamatan Jabon	510204	Belanja Perjalanan Dinas	214.551.483,00	173.720.960,00	143.750.200,00
7010800	Kecamatan Jabon	520201	Belanja Modal Alat Besar	22.294.850,00	14.115.000,00	0,00
7010800	Kecamatan Jabon	520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.331.880,00	9.975.000,00	8.158.500,00
7010800	Kecamatan Jabon	520210	Belanja Modal Komputer	82.023.450,00	80.250.000,00	41.086.295,00
				5.030.563.270,00	4.302.608.727,00	4.349.856.187,00

2.2 Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah

Salah satu cara untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan adalah dengan menggunakan analisis rasio atas laporan keuangan. Analisis laporan keuangan pada dasarnya merupakan analisis yang dilakukan terhadap berbagai macam informasi yang tersaji dalam laporan keuangan. Analisis rasio keuangan daerah yang biasa digunakan adalah (1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, (2) Rasio Efektivitas, (3) Rasio Keserasian dan (4) Rasio Pertumbuhan.

2.2.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) mengindikasikan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lainnya misalnya transfer pusat atau provinsi maupun pinjaman. Rasio kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat dihitung dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer} + \text{Pinjaman}}$$

Tabel Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer	Pinjaman	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
-------	------------------------	---------------------	----------	-----------------------------------

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Belanja Operasi}}$$

Tabel Rasio Kemandirian

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Belanja Operasional	Rasio Kemandirian
2022	0,00	4.300.611.392,00	0,00%
2023	0,00	4.198.268.727,00	0,00%

2.2.2 Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas berarti kemampuan daerah semakin baik. Rasio efektivitas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat dihitung dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target PAD yang ditetapkan sesuai potensi daerah}}$$

Rasio efektivitas Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

Tabel Rasio Efektivitas

Tahun	Target Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Rasio Efektivitas
2022	0,00		#Error

2.2.3 Rasio Jenis Belanja Terhadap Total Belanja

Rasio Jenis Belanja Terhadap Total Belanja merupakan rasio yang mendeskripsikan aktivitas pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada anggaran belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi berarti persentase belanja investasi yang dipakai untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat semakin kecil. Rasio keserasian dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}}$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}}$$

Rasio belanja operasi dibanding total belanja pada TA 2022 dan TA 2023 di Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

Tabel Rasio Belanja Operasi dibanding Total Belanja

Tahun	Belanja Operasi	Total Belanja	Rasio
2022	4.300.611.392,00	4.353.551.187,00	98,78%

2023	4.198.268.727,00	4.302.608.727,00	97,57%
------	------------------	------------------	--------

Sedangkan rasio belanja modal dibanding total APBD adalah sebagai berikut:

Tabel Rasio Belanja Modal dibanding Total Belanja

Tahun	Belanja Modal	Total Belanja	Rasio
2022	52.939.795,00	4.353.551.187,00	1,22%
2023	104.340.000,00	4.302.608.727,00	2,43%

2.2.4 Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai selama beberapa periode. Hal ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{PADt1} - \text{PADt0}}{\text{PADt0}}$$

Adapun perhitungan rasio pertumbuhan pendapatan pada Tahun 2022 sampai Tahun 2023 digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan	Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Selanjutnya, untuk perhitungan rasio pertumbuhan belanja tergambar sebagai berikut:

Tabel Rasio Pertumbuhan Belanja

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Modal	Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi	Rasio Pertumbuhan Belanja Modal
2022	4.300.611.392,00	52.939.795,00		
2023	4.198.268.727,00	104.340.000,00	-2,38%	97,09%

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

3.2 Kebijakan Akuntansi Akun

Kebijakan akuntansi akun yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

3.2.1 Kas

1. Pengakuan Kas

Kas dan setara kas yang diakui mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggungjawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara BLUD, bendahara dana BOS di sekolah negeri (SDN dan SMPN), dan *cash in transit*. Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepada pihak ketiga berupa Utang PFK.

Kas yang berasal dari penerimaan pendapatan daerah melalui pihak ketiga (misalnya penerimaan pajak daerah melalui jasa layanan pembayaran pada minimarket) diakui pada saat kas diterima oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, tunai dan non tunai.

2. Pengukuran Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

3. Penyajian dan Pengungkapan

Kas disajikan di neraca sebagai aset lancar. Pengungkapan kas meliputi:

- a. Rincian Kas dan Setara Kas;
- b. Kebijakan Manajemen Kas;
- c. Penyebab Timbulnya Kas Lainnya; dan
- d. Rincian dan Nilai Kas yang ada dalam RKUD namun merupakan Kas Transitoris;

3.2.2 Piutang

1. Pengakuan Piutang

- a. Piutang diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi meskipun kas atas pendapatan tersebut belum diterima di rekening kas umum daerah.
- b. Piutang Pajak diakui pada saat hak daerah untuk menagih timbul, yaitu sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, atau dokumen lainnya yang dipersamakan, namun Pemerintah Daerah belum menerima pembayaran atas tagihan tersebut. Dalam hal

pajak daerah bersifat *self assessment*, Piutang Pajak Daerah diakui berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dari wajib pajak dengan memperhitungkan nominal perhitungan dari otoritas perpajakan terkait atas selisih nominal antara SPTPD dengan perhitungan otoritas terkait.

- c. Piutang Retribusi diakui apabila satuan kerja telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya namun belum diterima pembayarannya, misalnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang mempunyai piutang atas sewa kios yang belum dibayar oleh penyewa pada akhir periode pelaporan.
- d. Pengakuan piutang pemberian pinjaman dilakukan pada saat terjadi realisasi pengeluaran uang dari rekening Kas Daerah, dan piutang tersebut berkurang apabila ada penerimaan di rekening Kas Daerah sehubungan dengan adanya penerimaan angsuran pokok pinjaman atau pelunasan. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai bunga dan denda maka setiap tanggal pelaporan keuangan, diakui adanya piutang bunga atau denda sebesar bunga untuk periode berjalan yang terutang sampai dengan tanggal pelaporan keuangan. Penerimaan pendapatan bunga dan denda lainnya yang berkaitan dengan pemberian pinjaman, dicatat sebagai pendapatan.
- e. Apabila terdapat penjualan secara cicilan atau angsuran maka sisa tagihan tersebut diakui sebagai piutang penjualan angsuran dan disajikan di neraca sebagai aset sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Piutang kemitraan pemerintah daerah timbul jika terdapat hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang, yang sampai dengan tanggal pelaporan keuangan belum dilunasi oleh mitra kerja samanya.
- g. Penyelesaian atas Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan ini dapat dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan) atau melalui pengadilan. Apabila penyelesaian tagihan ini dilakukan dengan cara damai, maka setelah proses pemeriksaan selesai dan telah ada Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dari pihak yang bersangkutan, diakui sebagai Piutang Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan dan disajikan di neraca untuk jumlah yang akan diterima lebih dari 12 bulan mendatang dan disajikan sebagai piutang kelompok aset lancar untuk jumlah yang akan diterima dalam waktu 12 bulan mendatang.
- h. Piutang Transfer Pemerintah Pusat diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.
- i. Piutang Transfer Antar Daerah diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang memberikan transfer.

2. Pengukuran Piutang

- a. Piutang diukur dan dicatat sebesar nilai nominal piutang yang belum dilunasi.
- b. Pengukuran piutang yang timbul karena peraturan perundang-undangan, dicatat sebagai berikut:
 - 1) Untuk metode *official assessment* piutang dicatat sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan sesuai dengan surat ketetapan, surat keputusan keberatan, putusan pengadilan, putusan peninjauan kembali, surat

penetapan dan/atau surat tagihan, dan hak negara untuk melakukan tindakan penagihan

- 2) Untuk *self assessment* dicatat sebesar pendapatan yang akan diterima pada akhir pelaporan sepanjang nilainya dapat diukur secara pasti termasuk didalamnya piutang yang muncul karena adanya penundaan atau pembayaran berkala.

c. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberian pinjaman Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
- 2) Penjualan Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
- 3) Kemitraan Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
- 4) Piutang yang timbul karena adanya putusan Lembaga Peradilan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam putusan tersebut.
- 5) Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen Lain yang Dipersamakan.

d. Piutang Transfer Pemerintah Pusat diukur sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku.

e. Piutang Transfer Antar Daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.

3. Penyisihan Piutang

Penyisihan atas piutang yang tidak tertagih diakui sebagai beban pada Tahun berjalan. Beban yang timbul dari piutang yang diperkirakan tidak tertagih disebut sebagai beban kerugian piutang. Terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dilakukan penyisihan, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Penyisihan terhadap piutang pajak daerah yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut:

- 1) Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 5% (lima persen).

- 2) Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 13 (tiga belas) sampai dengan 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 10% (sepuluh persen).
 - 3) Diragukan, apabila belum dilakukan pelunasan 37 (tiga puluh tujuh) sampai dengan 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 50% (lima puluh persen).
 - 4) Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 100% (seratus persen).
- b. Penyisihan terhadap piutang retribusi daerah yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut:
- 1) Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 5% (lima persen).
 - 2) Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 13 (tiga belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 10% (sepuluh persen).
 - 3) Diragukan, apabila belum dilakukan pelunasan 25 (dua puluh lima) sampai dengan 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 50% (lima puluh persen).
 - 4) Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 100% (seratus persen).
- c. Penyisihan terhadap piutang tuntutan ganti rugi daerah yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut:
- 1) Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan 6 (enam) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 5% (lima persen).
 - 2) Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 10% (sepuluh persen).
 - 3) Diragukan, apabila belum dilakukan pelunasan 13 (tiga belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 50% (lima puluh persen).
 - 4) Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 100% (seratus persen).
- d. Penyisihan terhadap piutang karena perikatan perjanjian yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut:
- 1) Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 5% (lima persen).

- 2) Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 10% (sepuluh persen).
 - 3) Diragukan, apabila belum dilakukan pelunasan antara 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 50% (lima puluh persen).
 - 4) Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo, penyisihan piutang tidak tertagih 100% (seratus persen).
- e. Piutang untuk investasi non permanen dana bergulir yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut:
- 1) Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 0,5% (nol koma lima persen).
 - 2) Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 10% (sepuluh persen).
 - 3) Tidak lancar, apabila belum dilakukan pelunasan antara 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 50% (lima puluh persen).
 - 4) Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 5 (lima) tahun sejak tanggal jatuh tempo, penyisihan piutang tidak tertagih 100% (seratus persen).

4. Penyajian dan Pengungkapan Piutang

Piutang disajikan pada Neraca.

Dalam penyajian neraca untuk piutang jangka panjang dapat dibedakan bagian lancar piutang dan piutang jangka panjang. Piutang yang diharapkan pengembaliannya dalam 12 (dua belas) setelah tanggal neraca dikelompokkan dalam Aset lancar, sedangkan piutang yang pengembaliannya lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca dikelompokkan pada Aset Non Lancar yaitu pada Kelompok Aset Lain-lain.

Informasi yang diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan antara lain:

- a. Rincian Jenis dan Jumlah Piutang;
- b. Jumlah Piutang dengan Pihak-Pihak yang memiliki hubungan istimewa;
- c. Jumlah Penyisihan Kerugian Piutang yang dibentuk; dan
- d. Jumlah Piutang yang dijadikan agunan pinjaman bank;

3.2.3 Beban Dibayar Dimuka

1. Pengakuan Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka diakui pada saat kas telah dikeluarkan kepada pihak ketiga, tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pihak ketiga kepada pemerintah daerah. Beban Dibayar Dimuka dihitung berdasarkan jumlah hari yang dimulai pada saat perikatan dan kas telah dikeluarkan.

2. Pengukuran Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka diukur dan dicatat sebesar nilai pembayaran. Nilai pembayaran artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat pengeluaran kas dalam bentuk valuta asing, maka harus dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi pembayaran.

3. Penyajian dan Pengungkapan

Beban Dibayar Dimuka disajikan pada Neraca pada kelompok Aset Lancar.

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain:

- a. Rincian beban dibayar dimuka;
- b. Tanggal transaksi, masa manfaat, dan tujuan penggunaan; dan
- c. Penjelasan timbulnya beban dibayar dimuka.

3.2.4 Persediaan

1. Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui pada saat:

- a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).

Barang yang disimpan untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras) diakui sebagai persediaan.

Barang yang dibayar menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah diakui ketika barang diterima, walaupun belum ada pembayaran.

2. Pengukuran Persediaan

a. Persediaan dicatat sebesar:

- 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- 2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis
- 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

b. Metode pencatatan persediaan dilakukan dengan:

- 1) Metode Perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-*update*. Digunakan untuk mencatat jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama SKPD dan

sifatnya *continues* serta membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan di RSUD dan Dinas Kesehatan dan asbuton dan sejenisnya pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air..

- 2) Metode Periodik, pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir /harga pokok produksi terakhir/nilai wajar. Digunakan untuk mencatat persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK).
- c. Penilaian persediaan menggunakan metode FIFO (*First in First Out*). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.

3. Penyajian dan Pengungkapan

Laporan keuangan mengungkapkan:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- c. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

3.2.5 Investasi Jangka Panjang

1. Pengakuan Investasi Jangka Panjang

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi salah satu kriteria:

- a. Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Daerah;
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya.

2. Pengukuran Investasi Jangka Panjang

- a. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar digunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki nilai pasar yang aktif dapat menggunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.
- b. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah Daerah dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.

3. Metode Penilaian Investasi Jangka Panjang

Penilaian Investasi Jangka Panjang menggunakan metode:

- a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
- d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

4. Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Panjang

- a. Investasi jangka panjang disajikan dalam neraca pada aset non lancar.
- b. Hal - hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain:
 - 1) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
 - 2) Jenis - jenis investasi, baik permanen dan non permanen;
 - 3) Perubahan harga pasar;
 - 4) Penurunan nilai investasi;
 - 5) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar; dan
 - 6) Perubahan pos investasi.

3.2.6 Investasi Jangka Panjang Non Permanen Dana Bergulir

1. Pengakuan Investasi Jangka Panjang Non Permanen Dana Bergulir

Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas. Pengeluaran Pembiayaan tersebut dicatat sebesar jumlah kas yang dikeluarkan untuk dana bergulir tersebut.

2. Pengukuran Investasi Jangka Panjang Non Permanen Dana Bergulir

Investasi Non Permanen dalam bentuk Dana Bergulir pada saat perolehan dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir, yaitu sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian terhadap Dana Bergulir.

3. Penyajian dan Pengungkapan

Pengeluaran dana Bergulir diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas. Pengeluaran Pembiayaan tersebut dicatat sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan Dana Bergulir.

Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang- Investasi Non Permanen-Dana Bergulir.

Hal - hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain:

- a. Dasar penilaian dana bergulir;
- b. Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya;
- c. Besarnya suku bunga;
- d. Saldo awal dana bergulir, penambahan/pengurangan, dan saldo akhir; dan
- e. Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur.

3.2.7 Aset Tetap

1. Pengakuan Aset Tetap

- a. Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Berwujud;
 - 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
 - 6) Nilai Rupiah pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- b. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap semua kriteria dalam huruf a harus dipenuhi.
- c. Pengadaan aset tetap pada huruf a dianggarkan dalam belanja modal

2. Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

3. Klasifikasi Aset Tetap

Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. Tanah;
- b. Peralatan dan Mesin;
- c. Gedung dan Bangunan;
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- e. Aset Tetap Lainnya;
- f. Konstruksi dalam Pengerjaan.

4. Kapitalisasi belanja menjadi aset tetap

Nilai satuan minimum kapitalisasi atas perolehan aset tetap dari hasil pengadaan baru untuk per satuan jenis aset atau harga per unit atas jenis aset ditetapkan sebagai berikut:

- a. Alat angkutan dan alat berat \geq Rp500.000,00
- b. Peralatan dan mesin lainnya selain alat angkutan dan alat berat \geq Rp300.000,00
- c. Aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan ternak, tanaman dan aset tetap lainnya selain buku-buku perpustakaan \geq Rp300.000,00
- d. Aset tetap lainnya berupa buku perpustakaan \geq Rp100.000,00
- e. Aset tetap konstruksi (bangunan) \geq Rp25.000.000,00
- f. Aset tetap (jalan) \geq Rp25.000.000,00
- g. Aset tetap (irigasi) \geq Rp25.000.000,00
- h. Aset tetap (jaringan) \geq Rp500.000,00

5. Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expenditures)

- a. Kapitalisasi atas pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap dapat dilakukan jika memenuhi dua kriteria, yaitu:
 - 1) Memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja.
 - 2) Memenuhi jumlah batasan minimum kapitalisasi (*capitalization threshold*).
- b. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap (*capitalization thresholds*) dari penambahan nilai aset tetap setelah perolehan awal adalah:
 - 1) Alat angkutan dan alat berat \geq Rp500.000,00
 - 2) Peralatan dan mesin lainnya selain alat angkutan dan alat berat \geq Rp300.000,00
 - 3) Aset tetap konstruksi bangunan \geq Rp25.000.000,00
 - 4) Aset tetap (jalan) \geq Rp25.000.000,00
 - 5) Aset tetap (irigasi) \geq Rp25.000.000,00
 - 6) Aset tetap (jaringan) \geq Rp500.000,00

3.2.8 Aset Lainnya

1. Pengakuan Aset Lainnya

- a. Secara umum Aset Lainnya dapat diakui pada saat:
 - 1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
 - 2) Diterima atau kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah.
- b. Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Pengukuran Aset Lainnya

Aset Lainnya dapat diukur sebagai berikut:

- a. Tagihan Jangka Panjang
 - 1) Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/ berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
 - 2) Setiap akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar tagihan penjualan angsuran (aset lancar).
 - 3) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan

setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

- 4) Setiap akhir periode akuntansi, TGRD yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar TGRD (aset lancar).

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Bentuk kemitraan tersebut antara lain:

- 1) Sewa;
- 2) Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna;
- 3) Kerja Sama Pemanfaatan; dan
- 4) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

Aset kemitraan dengan pihak ketiga diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kemitraan dengan pihak ketiga.

Aset kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BGS atau BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk dioperasikan.

c. Aset Tak Berwujud

Secara umum, ATB pada awalnya diukur dengan harga perolehan, kecuali ketika ATB diperoleh dengan cara selain pertukaran diukur dengan nilai wajar.

d. Aset Lain-Lain

Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

3. Penyajian dan Pengungkapan

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset Lainnya disajikan dalam neraca.

Hal - hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan untuk Aset Lainnya adalah:

- 1) Mutasi yang terjadi selama periode berjalan;
- 2) Rincian masing - masing pos; dan
- 3) Faktor - faktor yang menyebabkan penghentian penggunaan.

3.2.9 Kewajiban

1. Pengakuan Kewajiban

- a. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
- b. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul

2. Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

3. Penyajian dan Pengungkapan

Utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya. Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:

- a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
- b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
- c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
- e. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - 1) Pengurangan pinjaman;
 - 2) Modifikasi persyaratan utang;
 - 3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - 4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - 5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - 6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
- f. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur
- g. Utang berdasarkan kreditur.
- h. Biaya pinjaman:
 - 1) Perlakuan biaya pinjaman;
 - 2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - 3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

3.2.10 Pendapatan

1. Pengakuan

- a. Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah, diterima oleh Bendahara Penerimaan OPD atau diterima pada rekening Bendahara Penerimaan OPD.
- b. Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - 1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
 - 2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

2. Pengukuran

Pendapatan-LRA dan Pendapatan LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

3. Penyajian dan Pengungkapan

- a. Pendapatan LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran sesuai klasifikasi dalam BAS.
- b. Penjelasan sebab - sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
- c. Pendapatan LO disajikan pada Laporan Operasional sesuai klasifikasi dalam BAS.
- d. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal bersifat khusus.

3.2.11 Belanja dan Beban

1. Pengakuan Belanja dan Beban

- a. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Pengeluaran melalui rekening bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pengeluaran dari rekening kas bendahara pengeluaran.
- c. Beban diakui pada saat:
 - 1) Saat timbulnya kewajiban;
 - 2) Saat terjadinya konsumsi aset; dan
 - 3) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

2. Pengukuran Belanja dan Beban

- a. Belanja diukur berdasarkan realisasi belanja menurut klasifikasi yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran
- b. Beban diukur berdasarkan:
 - 1) harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
 - 2) taksiran nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

3. Penyajian dan Pengungkapan

- a. Belanja disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran sesuai klasifikasi dalam BAS.
- b. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah.
- c. Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai klasifikasi dalam BAS.
- d. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja.

3.2.12 Akuntansi atas Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan.

1. Koreksi Kesalahan

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis, yaitu:

- a. Kesalahan yang tidak berulang
- b. Kesalahan yang berulang dan sistemik

Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

- a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan
- b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis - jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya apabila laporan keuangan belum terbit, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya apabila laporan keuangan sudah terbit, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dan akun ekuitas.

Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.

Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundang - undangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku atau apabila diperkirakan bahwa perubahan kebijakan akuntansi tersebut akan menghasilkan informasi yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan.

Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3. Perubahan Estimasi Akuntansi

Untuk memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.

Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.

Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

4. Operasi yang Tidak Dilanjutkan

Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.

Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.

Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.

BAB IV
PENJELASAN POS LAPORAN KEUANGAN

4.1 Penjelasan Pos Laporan Realisasi Anggaran

Kode	Nama	Anggaran	Realisasi	Selisih
4	<i>Pendapatan</i>			0,00
41	Pendapatan Asli Daerah			0,00
410101	Pendapatan Pajak Daerah			0,00
410201	Pendapatan Retribusi Daerah			0,00
410301	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			0,00
410401	Lain-lain PAD yang Sah			0,00
42	Pendapatan Transfer			0,00
<i>4201</i>	<i>Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan</i>			<i>0,00</i>
420101	Dana Bagi Hasil Pajak			0,00
420102	Dana Hasil Sumber Daya Alam			0,00
420103	Dana Alokasi Umum			0,00
420104	Dana Alokasi Khusus			0,00
<i>4202</i>	<i>Transfer Pemerintah Pusat Lainnya</i>			<i>0,00</i>
420201	Dana Otonomi Khusus			0,00
420202	Dana Penyesuaian			0,00
<i>4203</i>	<i>Transfer Pemerintah Provinsi</i>			<i>0,00</i>
420301	Pendapatan Bagi Hasil Pajak			0,00
420302	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya			0,00
420303	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Lainnya			0,00
43	Lain-lain Pendapatan yang Sah			0,00
430101	Pendapatan Hibah			0,00
430201	Pendapatan Dana Darurat			0,00
<i>4303</i>	<i>Pendapatan Lainnya</i>			<i>0,00</i>
430301	Penjualan atas Tanah			0,00
430302	Penjualan atas Peralatan dan Mesin			0,00
430303	Penjualan atas Gedung dan Bangunan			0,00
430304	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan			0,00
430305	Penjualan Aset Tetap Lainnya			0,00
430306	Penjualan Aset Lainnya			0,00
430307	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen			0,00
430308	Pendapatan Lainnya			0,00

5	Belanja	5.030.563.270,00	4.302.608.727,00	727.954.543,00
51	Belanja Operasi	4.915.913.090,00	4.198.268.727,00	717.644.363,00
510101	Belanja Pegawai	2.796.539.657,00	2.530.822.010,00	265.717.647,00
510201	Belanja Barang	2.119.373.433,00	1.667.446.717,00	451.926.716,00
510301	Bunga			0,00
510401	Subsidi			0,00
510501	Hibah			0,00
510601	Bantuan Sosial			0,00
52	Belanja Modal	114.650.180,00	104.340.000,00	10.310.180,00
520101	Belanja Tanah			0,00
520201	Belanja Peralatan dan Mesin	114.650.180,00	104.340.000,00	10.310.180,00
520301	Belanja Gedung dan Bangunan			0,00
520401	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan			0,00
520501	Belanja Aset Tetap Lainnya			0,00
520601	Belanja Aset Lainnya			0,00
53	Belanja Tak Terduga			0,00
530101	Belanja Tak Terduga			0,00
54	Transfer			0,00
5401	<i>Transfer Bagi Hasil ke Desa</i>			0,00
540101	Bagi Hasil Pajak			0,00
540102	Bagi Hasil Retribusi			0,00
540103	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya			0,00
540201	Belanja Bantuan Keuangan			0,00
Surplus/Defisit		(5.030.563.270,00)	(4.302.608.727,00)	(727.954.543,00)
6	Penerimaan Pembiayaan			0,00
61	Penerimaan Pembiayaan			0,00
610101	Penggunaan SILPA			0,00
610201	Pencairan Dana Cadangan			0,00
610301	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			0,00
610401	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat			0,00
610501	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya			0,00
610601	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank			0,00
610701	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Bukan Bank			0,00
610801	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi			0,00
610901	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya			0,00
611001	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara			0,00
611101	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah			0,00

611201	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya			0,00
611301	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat			0,00
7	Pengeluaran Pembiayaan			0,00
72	Pengeluaran Pembiayaan			0,00
720101	Pembentukan Dana Cadangan			0,00
720201	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah			0,00
720301	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat			0,00
720401	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya			0,00
720501	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank			0,00
720601	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank			0,00
720701	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi			0,00
720801	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya			0,00
720901	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara			0,00
721001	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah			0,00
721101	Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya			0,00
721201	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen			0,00
Surplus/Defisit Pembiayaan				0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		(5.030.563.270,00)	(4.302.608.727,00)	(727.954.543,00)

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah

Kode Rekening	Uraian Pendapatan	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
5	Belanja Daerah	5.030.563.270,00	4.302.608.727,00	85,53%	4.353.551.187,00

Nilai realisasi Belanja Daerah pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp4.302.608.727,00 mengalami penurunan sebesar Rp50.942.460,00 atau 1,17% jika dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp4.353.551.187,00

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah

Kode	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
51	Belanja Operasi	4.915.913.090,00	4.198.268.727,00	85,40%	4.300.611.392,00
52	Belanja Modal	114.650.180,00	104.340.000,00	91,01%	52.939.795,00
Jumlah		5.030.563.270,00	4.302.608.727,00	85,53%	4.353.551.187,00

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

Kode Rekening	Uraian Pendapatan	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
51	Belanja Operasi	4.915.913.090,00	4.198.268.727,00	85,40%	4.300.611.392,00

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Pusat/Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.

Nilai realisasi Belanja Operasi pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp4.198.268.727,00 mengalami penurunan sebesar Rp102.342.665,00 atau 2,38% jika dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp4.300.611.392,00

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

Kode	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
5101	Belanja Pegawai	2.796.539.657,00	2.530.822.010,00	90,50%	2.453.422.920,00
5102	Belanja Barang dan Jasa	2.119.373.433,00	1.667.446.717,00	78,68%	1.847.188.472,00
Jumlah		4.915.913.090,00	4.198.268.727,00	85,40%	4.300.611.392,00

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

Kode Rekening	Uraian Pendapatan	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
5101	Belanja Pegawai	2.796.539.657,00	2.530.822.010,00	90,50%	2.453.422.920,00

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Nilai realisasi Belanja Pegawai pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp2.530.822.010,00 mengalami kenaikan sebesar Rp77.399.090,00 atau 3,15% jika dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp2.453.422.920,00

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

Kode	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
510101	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.194.271.425,00	1.151.304.163,00	96,40%	1.055.351.650,00
510102	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.466.808.232,00	1.252.349.847,00	85,38%	1.268.493.270,00
510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	135.460.000,00	127.168.000,00	93,88%	129.578.000,00
Jumlah		2.796.539.657,00	2.530.822.010,00	90,50%	2.453.422.920,00

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Kode Rekening	Uraian Pendapatan	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
510101	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.194.271.425,00	1.151.304.163,00	96,40%	1.055.351.650,00

Nilai realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.151.304.163,00 mengalami kenaikan sebesar Rp95.952.513,00 atau 9,09% jika dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp1.055.351.650,00

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Kode	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
51010101	Belanja Gaji Pokok ASN	876.670.400,00	844.375.940,00	96,32%	787.305.300,00
51010102	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	95.508.045,00	90.872.719,00	95,15%	68.356.931,00
51010103	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	50.280.000,00	50.180.000,00	99,80%	54.280.000,00
51010104	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	12.060.000,00	9.900.000,00	82,09%	4.680.000,00
51010105	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	30.450.000,00	30.080.000,00	98,78%	28.565.000,00
51010106	Belanja Tunjangan Beras ASN	59.094.720,00	56.704.860,00	95,96%	46.638.480,00
51010107	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.952.104,00	1.573.558,00	80,61%	2.118.138,00
51010108	Belanja Pembulatan Gaji ASN	16.098,00	14.095,00	87,56%	12.991,00
51010109	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	61.024.337,00	60.683.215,00	99,44%	56.912.050,00

	ASN				
51010110	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.803.982,00	1.729.994,00	95,90%	1.620.752,00
51010111	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	5.411.739,00	5.189.782,00	95,90%	4.862.008,00
Jumlah		1.194.271.425,00	1.151.304.163,00	96,40%	1.055.351.650,00

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Kode	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
510101010001	Belanja Gaji Pokok PNS	876.670.400,00	844.375.940,00	96,32%	787.305.300,00
510101020001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	95.508.045,00	90.872.719,00	95,15%	68.356.931,00
510101030001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	50.280.000,00	50.180.000,00	99,80%	54.280.000,00
510101040001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	12.060.000,00	9.900.000,00	82,09%	4.680.000,00
510101050001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	30.450.000,00	30.080.000,00	98,78%	28.565.000,00
510101060001	Belanja Tunjangan Beras PNS	59.094.720,00	56.704.860,00	95,96%	46.638.480,00
510101070001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.952.104,00	1.573.558,00	80,61%	2.118.138,00
510101080001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	16.098,00	14.095,00	87,56%	12.991,00
510101090001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	61.024.337,00	60.683.215,00	99,44%	56.912.050,00
510101100001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.803.982,00	1.729.994,00	95,90%	1.620.752,00
510101110001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	5.411.739,00	5.189.782,00	95,90%	4.862.008,00
Jumlah		1.194.271.425,00	1.151.304.163,00	96,40%	1.055.351.650,00

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Kode Rekening	Uraian Pendapatan	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
510102	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.466.808.232,00	1.252.349.847,00	85,38%	1.268.493.270,00

Nilai realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.252.349.847,00 mengalami penurunan sebesar Rp16.143.423,00 atau 1,27% jika dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp1.268.493.270,00

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Kode	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
51010201	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	922.803.992,00	849.842.591,00	92,09%	797.875.378,00
51010203	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	50.000.000,00	22.381.314,00	44,76%	0,00
51010205	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	494.004.240,00	380.125.942,00	76,95%	470.617.892,00
Jumlah		1.466.808.232,00	1.252.349.847,00	85,38%	1.268.493.270,00

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Kode	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
510102010001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	922.803.992,00	849.842.591,00	92,09%	797.875.378,00
510102030001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	50.000.000,00	22.381.314,00	44,76%	0,00
510102050001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	494.004.240,00	380.125.942,00	76,95%	470.617.892,00
Jumlah		1.466.808.232,00	1.252.349.847,00	85,38%	1.268.493.270,00

Tabel Anggaran dan Realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Kode Rekening	Uraian Pendapatan	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	135.460.000,00	127.168.000,00	93,88%	129.578.000,00

Nilai realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp127.168.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.410.000,00 atau 1,86% jika dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp129.578.000,00

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Kode	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
51010307	Belanja Honorarium	128.460.000,00	120.168.000,00	93,55%	115.278.000,00
51010308	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00%	14.300.000,00
Jumlah		135.460.000,00	127.168.000,00	93,88%	129.578.000,00

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Kode	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
510103070001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	93.420.000,00	87.258.000,00	93,40%	105.030.000,00
510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	35.040.000,00	32.910.000,00	93,92%	10.248.000,00
510103080002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00%	14.300.000,00
Jumlah		135.460.000,00	127.168.000,00	93,88%	129.578.000,00

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

Kode Rekening	Uraian Pendapatan	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
5102	Belanja Barang dan Jasa	2.119.373.433,00	1.667.446.717,00	78,68%	1.847.188.472,00

Belanja barang dan jasa adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Nilai realisasi Belanja Barang dan Jasa pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.667.446.717,00 mengalami penurunan sebesar Rp179.741.755,00 atau 9,73% jika dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp1.847.188.472,00

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

Kode	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
510201	Belanja Barang	263.084.294,00	195.671.280,00	74,38%	259.256.850,00
510202	Belanja Jasa	1.353.489.656,00	1.049.818.460,00	77,56%	976.674.765,00
510203	Belanja Pemeliharaan	288.248.000,00	248.236.017,00	86,12%	467.506.657,00
510204	Belanja Perjalanan Dinas	214.551.483,00	173.720.960,00	80,97%	143.750.200,00
Jumlah		2.119.373.433,00	1.667.446.717,00	78,68%	1.847.188.472,00

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Barang

Kode Rekening	Uraian Pendapatan	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
510201	Belanja Barang	263.084.294,00	195.671.280,00	74,38%	259.256.850,00

Nilai realisasi Belanja Barang pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp195.671.280,00 mengalami penurunan sebesar Rp63.585.570,00 atau 24,53% jika dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp259.256.850,00

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang

Kode	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
510201010001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	24.184.347,00	14.269.000,00	59,00%	0,00
510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	101.264.500,00	76.675.000,00	75,72%	89.600.000,00
510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	20.785.271,00	19.013.460,00	91,48%	32.038.000,00
510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	9.070.154,00	8.521.770,00	93,95%	16.828.900,00
510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	750.000,00	750.000,00	100,00%	1.800.000,00
510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	10.578.300,00	4.897.200,00	46,29%	8.929.000,00
510201010030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	9.435.222,00	6.080.600,00	64,45%	12.008.450,00
510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	7.689.000,00	7.028.000,00	91,40%	4.372.500,00
510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	900.000,00	250.000,00	27,78%	10.545.000,00
510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	71.927.500,00	51.816.250,00	72,04%	83.135.000,00
510201010076	Belanja Pakaian Olahraga	6.500.000,00	6.370.000,00	98,00%	0,00
Jumlah		263.084.294,00	195.671.280,00	74,38%	259.256.850,00

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa

Kode Rekening	Uraian Pendapatan	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
510202	Belanja Jasa	1.353.489.656,00	1.049.818.460,00	77,56%	976.674.765,00

Nilai realisasi Belanja Jasa pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.049.818.460,00 mengalami kenaikan sebesar Rp73.143.695,00 atau 7,49% jika dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp976.674.765,00

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa

Kode	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
51020201	Belanja Jasa Kantor	1.349.164.656,00	1.046.318.460,00	77,55%	939.261.723,00
51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.325.000,00	3.500.000,00	80,92%	5.395.000,00
51020208	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi		0,00	0,00%	19.478.042,00
51020212	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan		0,00	0,00%	12.540.000,00
Jumlah		1.353.489.656,00	1.049.818.460,00	77,56%	976.674.765,00

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa

Kode	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	420.800.000,00	175.500.000,00	41,71%	91.850.000,00
510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	54.000.000,00	54.000.000,00	100,00%	0,00
510202010016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	6.000.000,00	4.200.000,00	70,00%	0,00
510202010017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	186.798.580,00	186.223.840,00	99,69%	186.403.840,00
510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	149.438.864,00	137.166.816,00	91,79%	149.123.072,00
510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	186.807.496,00	183.218.396,00	98,08%	211.891.166,00
510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	37.359.716,00	37.312.768,00	99,87%	37.280.768,00
510202010059	Belanja Tagihan Telepon	5.400.000,00	449.494,00	8,32%	447.873,00
510202010060	Belanja Tagihan Air	18.000.000,00	12.981.000,00	72,12%	8.911.600,00
510202010061	Belanja Tagihan Listrik	84.000.000,00	70.931.846,00	84,44%	60.935.755,00
510202010062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.560.000,00	1.560.000,00	100,00%	1.560.000,00
510202010063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	186.000.000,00	180.720.600,00	97,16%	186.691.949,00
510202010067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	13.000.000,00	2.053.700,00	15,80%	4.165.700,00
510202040123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.325.000,00	3.500.000,00	80,92%	4.400.000,00
510202040463	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan	0,00	0,00	0,00%	995.000,00
510202080008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik	0,00	0,00	0,00%	12.465.772,00

	Sipil Air				
510202080021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa- Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	0,00	0,00	0,00%	7.012.270,00
510202120003	Belanja Bimbingan Teknis	0,00	0,00	0,00%	12.540.000,00
Jumlah		1.353.489.656,00	1.049.818.460,00	77,56%	976.674.765,00

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan

Kode Rekening	Uraian Pendapatan	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
510203	Belanja Pemeliharaan	288.248.000,00	248.236.017,00	86,12%	467.506.657,00

Nilai realisasi Belanja Pemeliharaan pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp248.236.017,00 mengalami penurunan sebesar Rp219.270.640,00 atau 46,90% jika dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp467.506.657,00

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan

Kode	Uraian	Anggaran TA	Realisasi TA	%	Realisasi TA -1
51020301	Belanja Pemeliharaan Tanah		0,00	0,00%	118.104.000,00
51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	135.500.000,00	101.607.296,00	74,99%	96.224.275,00
51020303	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		0,00	0,00%	54.800.665,00
51020304	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.000.000,00	14.818.500,00	98,79%	198.377.717,00
51020305	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	137.748.000,00	131.810.221,00	95,69%	0,00
Jumlah		288.248.000,00	248.236.017,00	86,12%	467.506.657,00

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan

Kode	Uraian	Anggaran TA	Realisasi TA	%	Realisasi TA -1
510203010017	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga	0,00	0,00	0,00%	118.104.000,00
510203020022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	7.500.000,00	6.904.000,00	92,05%	0,00
510203020035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	28.000.000,00	27.774.348,00	99,19%	21.418.275,00
510203020037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	20.000.000,00	19.999.400,00	100,00%	12.975.000,00
510203020121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	25.000.000,00	15.660.000,00	62,64%	14.850.000,00
510203020404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	15.000.000,00	14.992.548,00	99,95%	0,00
510203020405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	30.000.000,00	12.237.000,00	40,79%	38.903.000,00
510203020409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	10.000.000,00	4.040.000,00	40,40%	8.078.000,00
510203030001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00%	54.800.665,00

	Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor				
510203040035	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	0,00	0,00	0,00%	178.477.717,00
510203040126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	15.000.000,00	14.818.500,00	98,79%	19.900.000,00
510203050057	Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	137.748.000,00	131.810.221,00	95,69%	0,00
Jumlah		288.248.000,00	248.236.017,00	86,12%	467.506.657,00

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas

Kode Rekening	Uraian Pendapatan	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
510204	Belanja Perjalanan Dinas	214.551.483,00	173.720.960,00	80,97%	143.750.200,00

Nilai realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp173.720.960,00 mengalami kenaikan sebesar Rp29.970.760,00 atau 20,85% jika dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp143.750.200,00

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas

Kode	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	173.916.483,00	142.915.960,00	82,18%	66.410.200,00
510204010002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	0,00	0,00	0,00%	9.720.000,00
510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	40.635.000,00	30.805.000,00	75,81%	67.620.000,00
Jumlah		214.551.483,00	173.720.960,00	80,97%	143.750.200,00

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

Kode Rekening	Uraian Pendapatan	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
52	Belanja Modal	114.650.180,00	104.340.000,00	91,01%	52.939.795,00

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Belanja Modal terdiri dari:

Nilai realisasi Belanja Modal pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp104.340.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp51.400.205,00 atau 97,09% jika dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp52.939.795,00

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Kode Rekening	Uraian Pendapatan	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	114.650.180,00	104.340.000,00	91,01%	52.939.795,00

Nilai realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp104.340.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp51.400.205,00 atau 97,09% jika dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp52.939.795,00

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Kode	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
520201	Belanja Modal Alat Besar	22.294.850,00	14.115.000,00	63,31%	0,00
520203	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur		0,00	0,00%	795.000,00
520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.331.880,00	9.975.000,00	96,55%	8.158.500,00
520207	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan		0,00	0,00%	2.900.000,00
520210	Belanja Modal Komputer	82.023.450,00	80.250.000,00	97,84%	41.086.295,00
Jumlah		114.650.180,00	104.340.000,00	91,01%	52.939.795,00

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Besar

Kode Rekening	Uraian Pendapatan	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
520201	Belanja Modal Alat Besar	22.294.850,00	14.115.000,00	63,31%	0,00

Nilai realisasi Belanja Modal Alat Besar pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp14.115.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp14.115.000,00 atau 100,00% jika dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp0,00

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

Kode Rekening	Uraian Pendapatan	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.331.880,00	9.975.000,00	96,55%	8.158.500,00

Nilai realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp9.975.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.816.500,00 atau 22,27% jika dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp8.158.500,00

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

Kode	Uraian	Anggaran TA	Realisasi TA	%	Realisasi TA -1
520205020004	Belanja Modal Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00%	8.158.500,00
520205020006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.331.880,00	9.975.000,00	96,55%	0,00
Jumlah		10.331.880,00	9.975.000,00	96,55%	8.158.500,00

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Komputer

Kode Rekening	Uraian Pendapatan	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
520210	Belanja Modal Komputer	82.023.450,00	80.250.000,00	97,84%	41.086.295,00

Nilai realisasi Belanja Modal Komputer pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp80.250.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp39.163.705,00 atau 95,32% jika dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp41.086.295,00

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Komputer

Kode	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
52021001	Belanja Modal Komputer Unit	28.860.000,00	27.700.000,00	95,98%	36.736.295,00
52021002	Belanja Modal Peralatan Komputer	53.163.450,00	52.550.000,00	98,85%	4.350.000,00
Jumlah		82.023.450,00	80.250.000,00	97,84%	41.086.295,00

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Komputer

Kode	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
520210010002	Belanja Modal Personal Computer	28.860.000,00	27.700.000,00	95,98%	36.736.295,00
520210020003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	53.163.450,00	52.550.000,00	98,85%	4.350.000,00
Jumlah		82.023.450,00	80.250.000,00	97,84%	41.086.295,00

4.2 Penjelasan Pos Neraca

Kode	Nama	Tahun	Tahun -1
Aktiva		3.742.495.364,84	3.868.904.778,98
1	Aset	3.742.495.364,84	3.868.904.778,98
11	Aset Lancar	1.445.137,00	3.677.063,00
110101	Kas di Kas Daerah	0,00	0,00
110201	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
110202	Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00
110301	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
110302	Kas di BLUD	0,00	0,00
110303	Kas Lainnya	933.337,00	0,00
110401	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
110501	Piutang Pajak	0,00	0,00
110601	Piutang Retribusi	0,00	0,00
110701	Penyisihan Piutang	0,00	0,00
110801	Belanja Dibayar Dimuka	0,00	0,00
110901	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00
111001	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00
111101	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
111201	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
111301	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
111401	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00
111501	Piutang Lainnya	0,00	0,00
111601	Persediaan	511.800,00	3.677.063,00
12	Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
<i>1201</i>	<i>Investasi Nonpermanen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
120101	Pinjaman Jangka Panjang	0,00	0,00
120102	Investasi Surat Utang Negara	0,00	0,00
120103	Investasi Proyek Pembangunan	0,00	0,00
120104	Investasi Nonpermanen Lainnya	0,00	0,00
<i>1202</i>	<i>Investasi Permanen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
120201	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
120202	Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
13	Aset Tetap	3.813.372.056,69	3.863.118.915,98
130101	Tanah	1.439.615.100,00	1.439.615.100,00
130201	Peralatan dan Mesin	3.013.844.994,00	2.711.023.317,00
130301	Gedung dan Bangunan	3.953.213.302,00	3.953.213.302,00
130401	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	65.099.500,00	65.099.500,00
130501	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00

130601	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
130701	Akumulasi Penyusutan	(4.658.400.839,31)	(4.305.832.303,02)
14	Dana Cadangan	0,00	0,00
140101	Dana Cadangan	0,00	0,00
15	Aset Lainnya	2.108.800,00	2.108.800,00
150101	Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
150201	Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00
150301	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
150401	Aset Tak Berwujud	0,00	0,00
150501	Aset Lain-Lain	188.776.650,00	188.776.650,00
150601	Akumulasi Amortisasi	(186.667.850,00)	(186.667.850,00)
16	RK SKPD	(74.430.628,85)	0,00
160101	RK SKPD	(74.430.628,85)	0,00
Pasiva		3.742.495.364,84	3.868.904.778,98
2	Kewajiban	95.029.130,00	124.109.938,00
21	Kewajiban Jangka Pendek	95.029.130,00	124.109.938,00
210101	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
210201	Utang Bunga	0,00	0,00
210301	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
210401	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
210501	Utang Belanja	95.029.130,00	124.109.938,00
210601	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
22	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
220101	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	0,00	0,00
220201	Utang Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00
220301	Premium (Diskon) Obligasi	0,00	0,00
220401	Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
3	Ekuitas	3.647.466.234,84	3.744.794.840,98
31	Ekuitas	3.647.466.234,84	3.744.794.840,98
310101	Ekuitas	3.744.794.840,98	(608.756.346,02)
310201	Surplus/Defisit LO	(4.399.937.333,14)	0,00
3103	<i>Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan</i>	4.302.608.727,00	4.353.551.187,00
310301	RK PPKD	4.302.608.727,00	4.353.551.187,00

Tabel Rincian Aset

Kode	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	+/(-)
1	Aset	3.742.495.364,84	3.868.904.778,98	-3,27%
Jumlah		3.742.495.364,84	3.868.904.778,98	-3,27%

Saldo Aset per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.742.495.364,84 mengalami penurunan sebesar Rp126.409.414,14 atau 3,27% jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp3.868.904.778,98

Saldo Aset pada per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan sebagai berikut:

Table Rincian Aset

Kode	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	+/(-)
11	Aset Lancar	1.445.137,00	3.677.063,00	-60,70%
12	Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00%
13	Aset Tetap	3.813.372.056,69	3.863.118.915,98	-1,29%
15	Aset Lainnya	2.108.800,00	2.108.800,00	0,00%
16	RK SKPD	-74.430.628,85	0,00	0,00%
Jumlah		3.742.495.364,84	3.868.904.778,98	-3,27%

Tabel Rincian Aset Lancar

Kode	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	+/(-)
11	Aset Lancar	1.445.137,00	3.677.063,00	-60,70%
Jumlah		1.445.137,00	3.677.063,00	-60,70%

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.445.137,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.231.926,00 atau 60,70% jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp3.677.063,00

Saldo Aset Lancar pada per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan sebagai berikut:

Table Rincian Aset Lancar

Kode	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	+/(-)
1101	Kas di Kas Daerah	0,00	0,00	0,00%
1102	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00%
1103	Kas di Bendahara Penerimaan	933.337,00	0,00	0,00%
1105	Piutang Pajak	0,00	0,00	0,00%
1106	Piutang Retribusi	0,00	0,00	0,00%
1107	Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00%
1108	Belanja Dibayar Dimuka	0,00	0,00	0,00%
1114	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00	0,00%
1115	Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00%
1116	Persediaan	511.800,00	3.677.063,00	-86,08%
Jumlah		1.445.137,00	3.677.063,00	-60,70%

Tabel Rincian Kas di Kas Daerah

Kode	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	+/(-)
1101	Kas di Kas Daerah	0,00	0,00	0,00%
Jumlah		0,00	0,00	0,00%

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp0,00

Tabel Rincian Kas di Kas Daerah

Kode	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	+/(-)
110101	Kas di Kas Daerah	0,00	0,00	0,00%
Jumlah		0,00	0,00	0,00%

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp0,00

Tabel Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Kode	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	+/(-)
1102	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00%
Jumlah		0,00	0,00	0,00%

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan sebagai berikut:

Table Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Kode	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	+/(-)
110201	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00%
110202	Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00	0,00%
Jumlah		0,00	0,00	0,00%

Tabel Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Kode	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	+/(-)
110201	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00%
Jumlah		0,00	0,00	0,00%

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp0,00

Tabel Rincian Kas di Bendahara BOS

Kode	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	+/(-)
110202	Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00	0,00%
Jumlah		0,00	0,00	0,00%

Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp0,00

Tabel Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Kode	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	+/(-)
1103	Kas di Bendahara Penerimaan	933.337,00	0,00	0,00%
Jumlah		933.337,00	0,00	0,00%

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp933.337,00 mengalami kenaikan sebesar Rp933.337,00 atau 0,00% jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp0,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan sebagai berikut:

Table Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Kode	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	+/(-)
110301	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00%
110302	Kas di BLUD	0,00	0,00	0,00%
110303	Kas Lainnya	933.337,00	0,00	0,00%
Jumlah		933.337,00	0,00	0,00%

Tabel Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Kode	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	+/(-)
110301	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00%
Jumlah		0,00	0,00	0,00%

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp0,00

Tabel Rincian Kas di BLUD

Kode	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	+/(-)
110302	Kas di BLUD	0,00	0,00	0,00%
Jumlah		0,00	0,00	0,00%

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp0,00

Tabel Rincian Kas Lainnya

Kode	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	+/(-)
110303	Kas Lainnya	933.337,00	0,00	0,00%
Jumlah		933.337,00	0,00	0,00%

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp933.337,00 mengalami kenaikan sebesar Rp933.337,00 atau 0,00% jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp0,00

Tabel Rincian Piutang Pajak

Kode	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	+/(-)
1105	Piutang Pajak	0,00	0,00	0,00%
Jumlah		0,00	0,00	0,00%

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp0,00

Tabel Rincian Piutang Pajak

Kode	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	+/(-)
110501	Piutang Pajak	0,00	0,00	0,00%
Jumlah		0,00	0,00	0,00%

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp0,00

Tabel Rincian Piutang Retribusi

Kode	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	+/(-)
1106	Piutang Retribusi	0,00	0,00	0,00%
Jumlah		0,00	0,00	0,00%

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp0,00

Tabel Rincian Piutang Retribusi

Kode	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	+/(-)
110601	Piutang Retribusi	0,00	0,00	0,00%
Jumlah		0,00	0,00	0,00%

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp0,00

Tabel Rincian Penyisihan Piutang

Kode	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	+/(-)
1107	Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00%
Jumlah		0,00	0,00	0,00%

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp0,00

Tabel Rincian Penyisihan Piutang

Kode	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	+/(-)
110701	Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00%
Jumlah		0,00	0,00	0,00%

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp0,00

Tabel Rincian Belanja Dibayar Dimuka

Kode	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	+/(-)
1108	Belanja Dibayar Dimuka	0,00	0,00	0,00%
Jumlah		0,00	0,00	0,00%

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp0,00

Tabel Rincian Belanja Dibayar Dimuka

Kode	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	+/(-)
110801	Belanja Dibayar Dimuka	0,00	0,00	0,00%
Jumlah		0,00	0,00	0,00%

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp0,00

Tabel Rincian Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Kode	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	+/(-)
1114	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00	0,00%
Jumlah		0,00	0,00	0,00%

Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp0,00

Tabel Rincian Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Kode	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	+/(-)
111401	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00	0,00%
Jumlah		0,00	0,00	0,00%

Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp0,00

Tabel Rincian Piutang Lainnya

Kode	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	+/(-)
1115	Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00%
Jumlah		0,00	0,00	0,00%

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp0,00

Tabel Rincian Piutang Lainnya

Kode	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	+/(-)
111501	Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00%
Jumlah		0,00	0,00	0,00%

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp0,00

Tabel Rincian Persediaan

Kode	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	+/(-)
1116	Persediaan	511.800,00	3.677.063,00	-86,08%
Jumlah		511.800,00	3.677.063,00	-86,08%

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp511.800,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.165.263,00 atau 86,08% jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp3.677.063,00

Tabel Rincian Persediaan

Kode	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	+/(-)
111601	Persediaan	511.800,00	3.677.063,00	-86,08%
Jumlah		511.800,00	3.677.063,00	-86,08%

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp511.800,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.165.263,00 atau 86,08% jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp3.677.063,00

Tabel Rincian Investasi Jangka Panjang

Kode	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	+/(-)
12	Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00%
Jumlah		0,00	0,00	0,00%

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp0,00

Saldo Investasi Jangka Panjang pada per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan sebagai berikut:

Table Rincian Investasi Jangka Panjang

Kode	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	+/(-)
1201	Investasi Nonpermanen	0,00	0,00	0,00%
1202	Investasi Permanen	0,00	0,00	0,00%
Jumlah		0,00	0,00	0,00%

Tabel Rincian Investasi Nonpermanen

Kode	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	+/(-)
1201	Investasi Nonpermanen	0,00	0,00	0,00%
Jumlah		0,00	0,00	0,00%

Saldo Investasi Nonpermanen per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp0,00

Tabel Rincian Investasi Nonpermanen Lainnya

Kode	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	+/(-)
120104	Investasi Nonpermanen Lainnya	0,00	0,00	0,00%
Jumlah		0,00	0,00	0,00%

Saldo Investasi Nonpermanen Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp0,00

Tabel Rincian Investasi Permanen

Kode	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	+/(-)
1202	Investasi Permanen	0,00	0,00	0,00%
Jumlah		0,00	0,00	0,00%

Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp0,00

Tabel Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Kode	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	+/(-)
120201	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00%
Jumlah		0,00	0,00	0,00%

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp0,00

Tabel Rincian Aset Tetap

Kode	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	+/(-)
13	Aset Tetap	3.813.372.056,69	3.863.118.915,98	-1,29%
Jumlah		3.813.372.056,69	3.863.118.915,98	-1,29%

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.813.372.056,69 mengalami penurunan sebesar Rp49.746.859,29 atau 1,29% jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp3.863.118.915,98

Saldo Aset Tetap pada per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan sebagai berikut:

Table Rincian Aset Tetap

Kode	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	+/(-)
1301	Tanah	1.439.615.100,00	1.439.615.100,00	0,00%
1302	Peralatan dan Mesin	3.013.844.994,00	2.711.023.317,00	11,17%
1303	Gedung dan Bangunan	3.953.213.302,00	3.953.213.302,00	0,00%
1304	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	65.099.500,00	65.099.500,00	0,00%
1305	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00%
1306	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00%
1307	Akumulasi Penyusutan	-4.658.400.839,31	-4.305.832.303,02	8,19%
Jumlah		3.813.372.056,69	3.863.118.915,98	-1,29%

Tabel Rincian Tanah

Kode	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	+/(-)
1301	Tanah	1.439.615.100,00	1.439.615.100,00	0,00%
Jumlah		1.439.615.100,00	1.439.615.100,00	0,00%

Saldo Tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.439.615.100,00 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp1.439.615.100,00

Tabel Rincian Tanah

Kode	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	+/(-)
130101	Tanah	1.439.615.100,00	1.439.615.100,00	0,00%
Jumlah		1.439.615.100,00	1.439.615.100,00	0,00%

Saldo Tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.439.615.100,00 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp1.439.615.100,00

Tabel Rincian Peralatan dan Mesin

Kode	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	+/(-)
1302	Peralatan dan Mesin	3.013.844.994,00	2.711.023.317,00	11,17%
Jumlah		3.013.844.994,00	2.711.023.317,00	11,17%

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.013.844.994,00 mengalami kenaikan sebesar Rp302.821.677,00 atau 11,17% jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp2.711.023.317,00

Tabel Rincian Peralatan dan Mesin

Kode	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	+/(-)
130201	Peralatan dan Mesin	3.013.844.994,00	2.711.023.317,00	11,17%
Jumlah		3.013.844.994,00	2.711.023.317,00	11,17%

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.013.844.994,00 mengalami kenaikan sebesar Rp302.821.677,00 atau 11,17% jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp2.711.023.317,00

Tabel Rincian Gedung dan Bangunan

Kode	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	+/(-)
1303	Gedung dan Bangunan	3.953.213.302,00	3.953.213.302,00	0,00%
Jumlah		3.953.213.302,00	3.953.213.302,00	0,00%

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.953.213.302,00 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp3.953.213.302,00

Tabel Rincian Gedung dan Bangunan

Kode	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	+/(-)
130301	Gedung dan Bangunan	3.953.213.302,00	3.953.213.302,00	0,00%
Jumlah		3.953.213.302,00	3.953.213.302,00	0,00%

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.953.213.302,00 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp3.953.213.302,00

Tabel Rincian Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Kode	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	+/(-)
1304	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	65.099.500,00	65.099.500,00	0,00%
Jumlah		65.099.500,00	65.099.500,00	0,00%

Saldo Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp65.099.500,00 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp65.099.500,00

Tabel Rincian Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Kode	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	+/(-)
130401	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	65.099.500,00	65.099.500,00	0,00%
Jumlah		65.099.500,00	65.099.500,00	0,00%

Saldo Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp65.099.500,00 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp65.099.500,00

Tabel Rincian Aset Tetap Lainnya

Kode	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	+/(-)
1305	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00%
Jumlah		0,00	0,00	0,00%

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp0,00

Tabel Rincian Aset Tetap Lainnya

Kode	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	+/(-)
130501	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00%
Jumlah		0,00	0,00	0,00%

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp0,00

Tabel Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

Kode	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	+/(-)
1306	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00%
Jumlah		0,00	0,00	0,00%

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp0,00

Tabel Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

Kode	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	+/(-)
130601	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00%
Jumlah		0,00	0,00	0,00%

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp0,00

Tabel Rincian Akumulasi Penyusutan

Kode	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	+/(-)
1307	Akumulasi Penyusutan	-4.658.400.839,31	-4.305.832.303,02	8,19%
Jumlah		-4.658.400.839,31	-4.305.832.303,02	8,19%

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar (Rp4.658.400.839,31) mengalami penurunan sebesar Rp352.568.536,29 atau 8,19% jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar (Rp4.305.832.303,02)

Tabel Rincian Akumulasi Penyusutan

Kode	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	+/(-)
130701	Akumulasi Penyusutan	-4.658.400.839,31	-4.305.832.303,02	8,19%
Jumlah		-4.658.400.839,31	-4.305.832.303,02	8,19%

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar (Rp4.658.400.839,31) mengalami penurunan sebesar Rp352.568.536,29 atau 8,19% jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar (Rp4.305.832.303,02)

Tabel Rincian Aset Lainnya

Kode	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	+/(-)
15	Aset Lainnya	2.108.800,00	2.108.800,00	0,00%
Jumlah		2.108.800,00	2.108.800,00	0,00%

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.108.800,00 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp2.108.800,00

Saldo Aset Lainnya pada per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan sebagai berikut:

Table Rincian Aset Lainnya

Kode	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	+/(-)
1502	Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00	0,00%
1503	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00%
1504	Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00%
1505	Aset Lain-Lain	188.776.650,00	188.776.650,00	0,00%
1506	Akumulasi Amortisasi	-186.667.850,00	-186.667.850,00	0,00%
Jumlah		2.108.800,00	2.108.800,00	0,00%

Tabel Rincian Tuntutan Ganti Rugi

Kode	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	+/(-)
1502	Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00	0,00%
Jumlah		0,00	0,00	0,00%

Saldo Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp0,00

Tabel Rincian Tuntutan Ganti Rugi

Kode	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	+/(-)
150201	Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00	0,00%
Jumlah		0,00	0,00	0,00%

Saldo Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp0,00

Tabel Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kode	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	+/(-)
1503	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00%
Jumlah		0,00	0,00	0,00%

Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp0,00

Tabel Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kode	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	+/(-)
150301	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00%
Jumlah		0,00	0,00	0,00%

Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp0,00

Tabel Rincian Aset Tak Berwujud

Kode	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	+/(-)
1504	Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00%
Jumlah		0,00	0,00	0,00%

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp0,00

Tabel Rincian Aset Tak Berwujud

Kode	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	+/(-)
150401	Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00%
Jumlah		0,00	0,00	0,00%

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp0,00

Tabel Rincian Aset Lain-Lain

Kode	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	+/(-)
1505	Aset Lain-Lain	188.776.650,00	188.776.650,00	0,00%
Jumlah		188.776.650,00	188.776.650,00	0,00%

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp188.776.650,00 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp188.776.650,00

Tabel Rincian Aset Lain-Lain

Kode	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	+/(-)
150501	Aset Lain-Lain	188.776.650,00	188.776.650,00	0,00%
Jumlah		188.776.650,00	188.776.650,00	0,00%

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp188.776.650,00 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp188.776.650,00

Tabel Rincian Akumulasi Amortisasi

Kode	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	+/(-)
1506	Akumulasi Amortisasi	-186.667.850,00	-186.667.850,00	0,00%
Jumlah		-186.667.850,00	-186.667.850,00	0,00%

Saldo Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2023 sebesar (Rp186.667.850,00) mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar (Rp186.667.850,00)

Tabel Rincian Akumulasi Amortisasi

Kode	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	+/(-)
150601	Akumulasi Amortisasi	-186.667.850,00	-186.667.850,00	0,00%
Jumlah		-186.667.850,00	-186.667.850,00	0,00%

Saldo Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2023 sebesar (Rp186.667.850,00) mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar (Rp186.667.850,00)

Tabel Rincian RK SKPD

Kode	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	+/(-)
16	RK SKPD	-74.430.628,85	0,00	0,00%
Jumlah		-74.430.628,85	0,00	0,00%

Saldo RK SKPD per 31 Desember 2023 sebesar (Rp74.430.628,85) mengalami penurunan sebesar Rp74.430.628,85 atau 0,00% jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp0,00

Tabel Rincian RK SKPD

Kode	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	+/(-)
1601	RK SKPD	-74.430.628,85	0,00	0,00%
Jumlah		-74.430.628,85	0,00	0,00%

Saldo RK SKPD per 31 Desember 2023 sebesar (Rp74.430.628,85) mengalami penurunan sebesar Rp74.430.628,85 atau 0,00% jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp0,00

Tabel Rincian RK SKPD

Kode	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	+/(-)
160101	RK SKPD	-74.430.628,85	0,00	0,00%
Jumlah		-74.430.628,85	0,00	0,00%

Saldo RK SKPD per 31 Desember 2023 sebesar (Rp74.430.628,85) mengalami penurunan sebesar Rp74.430.628,85 atau 0,00% jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp0,00

Tabel Rincian Kewajiban

Kode	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	+/(-)
2	Kewajiban	95.029.130,00	124.109.938,00	-23,43%
Jumlah		95.029.130,00	124.109.938,00	-23,43%

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2023 sebesar Rp95.029.130,00 mengalami penurunan

sebesar Rp29.080.808,00 atau 23,43% jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp124.109.938,00

Tabel Rincian Kewajiban Jangka Pendek

Kode	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	+/(%)
21	Kewajiban Jangka Pendek	95.029.130,00	124.109.938,00	-23,43%
Jumlah		95.029.130,00	124.109.938,00	-23,43%

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 sebesar Rp95.029.130,00 mengalami penurunan sebesar Rp29.080.808,00 atau 23,43% jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp124.109.938,00

Saldo Kewajiban Jangka Pendek pada per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan sebagai berikut:

Table Rincian Kewajiban Jangka Pendek

Kode	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	+/(%)
2104	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00	0,00%
2105	Utang Belanja	95.029.130,00	124.109.938,00	-23,43%
2106	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	0,00%
Jumlah		95.029.130,00	124.109.938,00	-23,43%

Tabel Rincian Pendapatan Diterima Dimuka

Kode	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	+/(%)
2104	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00	0,00%
Jumlah		0,00	0,00	0,00%

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp0,00

Tabel Rincian Pendapatan Diterima Dimuka

Kode	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	+/(%)
210401	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00	0,00%
Jumlah		0,00	0,00	0,00%

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp0,00

Tabel Rincian Utang Belanja

Kode	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	+/(-)
2105	Utang Belanja	95.029.130,00	124.109.938,00	-23,43%
Jumlah		95.029.130,00	124.109.938,00	-23,43%

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2023 sebesar Rp95.029.130,00 mengalami penurunan sebesar Rp29.080.808,00 atau 23,43% jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp124.109.938,00

Tabel Rincian Utang Belanja

Kode	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	+/(-)
210501	Utang Belanja	95.029.130,00	124.109.938,00	-23,43%
Jumlah		95.029.130,00	124.109.938,00	-23,43%

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2023 sebesar Rp95.029.130,00 mengalami penurunan sebesar Rp29.080.808,00 atau 23,43% jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp124.109.938,00

Tabel Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya

Kode	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	+/(-)
2106	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	0,00%
Jumlah		0,00	0,00	0,00%

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp0,00

Tabel Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya

Kode	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	+/(-)
210601	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	0,00%
Jumlah		0,00	0,00	0,00%

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp0,00

Tabel Rincian Ekuitas

Kode	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	+/(-)
3	Ekuitas	3.647.466.234,84	3.744.794.840,98	-2,60%
Jumlah		3.647.466.234,84	3.744.794.840,98	-2,60%

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.647.466.234,84 mengalami penurunan sebesar Rp97.328.606,14 atau 2,60% jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp3.744.794.840,98

Tabel Rincian Ekuitas

Kode	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	+/(-)
31	Ekuitas	3.647.466.234,84	3.744.794.840,98	-2,60%
Jumlah		3.647.466.234,84	3.744.794.840,98	-2,60%

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.647.466.234,84 mengalami penurunan sebesar Rp97.328.606,14 atau 2,60% jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp3.744.794.840,98

Saldo Ekuitas pada per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan sebagai berikut:

Table Rincian Ekuitas

Kode	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	+/(-)
3101	Ekuitas	3.744.794.840,98	-608.756.346,02	-715,15%
3102	Surplus/Defisit LO	-4.399.937.333,14	0,00	0,00%
3103	Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	4.302.608.727,00	4.353.551.187,00	-1,17%
Jumlah		3.647.466.234,84	3.744.794.840,98	-2,60%

Tabel Rincian Ekuitas

Kode	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	+/(-)
3101	Ekuitas	3.744.794.840,98	-608.756.346,02	-715,15%
Jumlah		3.744.794.840,98	-608.756.346,02	-715,15%

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.744.794.840,98 mengalami kenaikan sebesar Rp4.353.551.187,00 atau 715,15% jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar (Rp608.756.346,02)

abel Rincian Surplus/Defisit LO

Kode	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	+/(-)
3102	Surplus/Defisit LO	-4.399.937.333,14	0,00	0,00%
Jumlah		-4.399.937.333,14	0,00	0,00%

Saldo Surplus/Defisit LO per 31 Desember 2023 sebesar (Rp4.399.937.333,14) mengalami

penurunan sebesar Rp4.399.937.333,14 atau 0,00% jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp0,00

Tabel Rincian Surplus/Defisit LO

Kode	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	+/(-)
310201	Surplus/Defisit LO	-4.399.937.333,14	0,00	0,00%
Jumlah		-4.399.937.333,14	0,00	0,00%

Saldo Surplus/Defisit LO per 31 Desember 2023 sebesar (Rp4.399.937.333,14) mengalami penurunan sebesar Rp4.399.937.333,14 atau 0,00% jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp0,00

Tabel Rincian Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan

Kode	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	+/(-)
3103	Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	4.302.608.727,00	4.353.551.187,00	-1,17%
Jumlah		4.302.608.727,00	4.353.551.187,00	-1,17%

Saldo Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.302.608.727,00 mengalami penurunan sebesar Rp50.942.460,00 atau 1,17% jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp4.353.551.187,00

Tabel Rincian RK PPKD

Kode	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	+/(-)
310301	RK PPKD	4.302.608.727,00	4.353.551.187,00	-1,17%
Jumlah		4.302.608.727,00	4.353.551.187,00	-1,17%

Saldo RK PPKD per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.302.608.727,00 mengalami penurunan sebesar Rp50.942.460,00 atau 1,17% jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp4.353.551.187,00

4.3 Penjelasan Pos Laporan Operasional

Nama	Tahun Ini
Pendapatan	0,00
<i>Pendapatan Asli Daerah</i>	0,00
Pendapatan Pajak Daerah	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah	0,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00
Pendapatan Asli Daerah Lainnya	0,00
<i>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</i>	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak	0,00
Dana Hasil Sumber Daya Alam	0,00
Dana Alokasi Umum	0,00
Dana Alokasi Khusus	0,00
<i>Transfer Pemerintah Pusat Lainnya</i>	0,00
Dana Otonomi Khusus	0,00
Dana Penyesuaian	0,00
<i>Transfer Pemerintah Provinsi</i>	0,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	0,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Lainnya	0,00
<i>Lain-lain Pendapatan yang Sah</i>	0,00
Pendapatan Hibah	0,00
Pendapatan Dana Darurat	0,00
Pendapatan Lainnya	0,00
Beban	4.399.937.333,14
Beban Pegawai	2.500.715.127,00
Beban Persediaan	197.903.206,00
Beban Jasa	1.050.844.535,00
Beban Pemeliharaan	248.236.017,00
Beban Perjalanan Dinas	173.720.960,00
Beban Bunga	0,00
Beban Subsidi	0,00
Beban Hibah	0,00
Beban Bantuan Sosial	0,00
Beban Penyusutan	228.517.488,14
Beban Amortisasi	0,00
Beban Transfer	0,00
Beban Lain-lain	0,00
Beban Penyisihan Piutang	0,00
SURPLUS/(DEFISIT) KEGIATAN OPERASIONAL	(4.399.937.333,14)

SURPLUS	0,00
Surplus Penjualan Aset Nonlancar	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00
DEFISIT	0,00
Defisit Penjualan Aset Nonlancar	0,00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00
SURPLUS/(DEFISIT) KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA	(4.399.937.333,14)
SURPLUS	0,00
Pendapatan Luar Biasa	0,00
DEFISIT	0,00
Beban Luar Biasa	0,00
SURPLUS/(DEFISIT) POS LUAR BIASA	0,00
SURPLUS/(DEFISIT)-LO	(4.399.937.333,14)

Tabel Beban Daerah

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/(Turun)	%
8	Beban Daerah	4.399.937.333,14	4.502.100.382,51	(102.163.049,37)	-2,27%

Nilai Beban Daerah pada tahun 2023 sebesar Rp4.399.937.333,14 mengalami penurunan sebesar Rp102.163.049,37 atau 2,27% jika dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp4.502.100.382,51

Tabel Rincian Beban Daerah

Kode	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/(Turun)	%
81	Beban Operasi	4.171.419.845,00	4.298.741.604,00	(127.321.759,00)	-2,96%
82	Beban Penyusutan Dan Amortisasi	228.517.488,14	200.260.778,51	28.256.709,63	14,11%
85	Defisit Non Operasional-LO	0,00	3.098.000,00	(3.098.000,00)	-100,00%
Jumlah		4.399.937.333,14	4.502.100.382,51	(102.163.049,37)	-2,27%

Tabel Beban Operasi

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/(Turun)	%
81	Beban Operasi	4.171.419.845,00	4.298.741.604,00	(127.321.759,00)	-2,96%

Nilai Beban Operasi pada tahun 2023 sebesar Rp4.171.419.845,00 mengalami penurunan sebesar Rp127.321.759,00 atau 2,96% jika dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp4.298.741.604,00

Tabel Rincian Beban Operasi

Kode	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/(Turun)	%
8101	Beban Pegawai	2.500.715.127,00	2.448.679.913,00	52.035.214,00	2,13%
8102	Beban Barang dan Jasa	1.670.704.718,00	1.850.061.691,00	(179.356.973,00)	-9,69%
Jumlah		4.171.419.845,00	4.298.741.604,00	(127.321.759,00)	-2,96%

Tabel Beban Pegawai

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/(Turun)	%
8101	Beban Pegawai	2.500.715.127,00	2.448.679.913,00	52.035.214,00	2,13%

Nilai Beban Pegawai pada tahun 2023 sebesar Rp2.500.715.127,00 mengalami kenaikan sebesar Rp52.035.214,00 atau 2,13% jika dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp2.448.679.913,00

Tabel Rincian Beban Pegawai

Kode	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/(Turun)	%
810101	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.150.607.351,00	1.056.048.462,00	94.558.889,00	8,95%
810102	Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.222.939.776,00	1.263.053.451,00	(40.113.675,00)	-3,18%
810103	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	127.168.000,00	129.578.000,00	(2.410.000,00)	-1,86%
Jumlah		2.500.715.127,00	2.448.679.913,00	52.035.214,00	2,13%

Tabel Beban Gaji dan Tunjangan ASN

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/(Turun)	%
810101	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.150.607.351,00	1.056.048.462,00	94.558.889,00	8,95%

Nilai Beban Gaji dan Tunjangan ASN pada tahun 2023 sebesar Rp1.150.607.351,00 mengalami kenaikan sebesar Rp94.558.889,00 atau 8,95% jika dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp1.056.048.462,00

Tabel Rincian Beban Gaji dan Tunjangan ASN

Kode	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/(Turun)	%
81010101	Beban Gaji Pokok ASN	843.679.128,00	788.002.112,00	55.677.016,00	7,07%
81010102	Beban Tunjangan Keluarga ASN	90.872.719,00	68.356.931,00	22.515.788,00	32,94%
81010103	Beban Tunjangan Jabatan ASN	50.180.000,00	54.280.000,00	(4.100.000,00)	-7,55%
81010104	Beban Tunjangan Fungsional ASN	9.900.000,00	4.680.000,00	5.220.000,00	111,54%
81010105	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	30.080.000,00	28.565.000,00	1.515.000,00	5,30%
81010106	Beban Tunjangan Beras ASN	56.704.860,00	46.638.480,00	10.066.380,00	21,58%
81010107	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.573.558,00	2.118.138,00	(544.580,00)	-25,71%
81010108	Beban Pembulatan Gaji ASN	14.095,00	12.991,00	1.104,00	8,50%
81010109	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	60.683.215,00	56.912.050,00	3.771.165,00	6,63%
81010110	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.729.994,00	1.620.752,00	109.242,00	6,74%
81010111	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	5.189.782,00	4.862.008,00	327.774,00	6,74%
Jumlah		1.150.607.351,00	1.056.048.462,00	94.558.889,00	8,95%

Tabel Rincian Beban Gaji dan Tunjangan ASN

Kode	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/(Turun)	%
810101010001	Beban Gaji Pokok PNS	843.679.128,00	788.002.112,00	55.677.016,00	7,07%
810101020001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	90.872.719,00	68.356.931,00	22.515.788,00	32,94%
810101030001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	50.180.000,00	54.280.000,00	(4.100.000,00)	-7,55%
810101040001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	9.900.000,00	4.680.000,00	5.220.000,00	111,54%
810101050001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	30.080.000,00	28.565.000,00	1.515.000,00	5,30%
810101060001	Beban Tunjangan Beras PNS	56.704.860,00	46.638.480,00	10.066.380,00	21,58%
810101070001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.573.558,00	2.118.138,00	(544.580,00)	-25,71%
810101080001	Beban Pembulatan Gaji PNS	14.095,00	12.991,00	1.104,00	8,50%
810101090001	Beban luran Jaminan Kesehatan PNS	60.683.215,00	56.912.050,00	3.771.165,00	6,63%
810101100001	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.729.994,00	1.620.752,00	109.242,00	6,74%
810101110001	Beban luran Jaminan Kematian PNS	5.189.782,00	4.862.008,00	327.774,00	6,74%
Jumlah		1.150.607.351,00	1.056.048.462,00	94.558.889,00	8,95%

Tabel Beban Tambahan Penghasilan ASN

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/(Turun)	%
810102	Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.222.939.776,00	1.263.053.451,00	(40.113.675,00)	-3,18%

Nilai Beban Tambahan Penghasilan ASN pada tahun 2023 sebesar Rp1.222.939.776,00 mengalami penurunan sebesar Rp40.113.675,00 atau 3,18% jika dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp1.263.053.451,00

Tabel Rincian Beban Tambahan Penghasilan ASN

Kode	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/(Turun)	%
81010201	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	849.842.591,00	797.875.378,00	51.967.213,00	6,51%
81010203	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	22.381.314,00	0,00	22.381.314,00	0,00%
81010205	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	350.715.871,00	465.178.073,00	(114.462.202,00)	-24,61%
Jumlah		1.222.939.776,00	1.263.053.451,00	(40.113.675,00)	-3,18%

Tabel Rincian Beban Tambahan Penghasilan ASN

Kode	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/(Turun)	%
810102010001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	849.842.591,00	797.875.378,00	51.967.213,00	6,51%
810102030001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	22.381.314,00	0,00	22.381.314,00	0,00%

810102050001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	350.715.871,00	465.178.073,00	(114.462.202,00)	-24,61%
Jumlah		1.222.939.776,00	1.263.053.451,00	(40.113.675,00)	-3,18%

Tabel Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/(Turun)	%
810103	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	127.168.000,00	129.578.000,00	(2.410.000,00)	-1,86%

Nilai Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN pada tahun 2023 sebesar Rp127.168.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.410.000,00 atau 1,86% jika dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp129.578.000,00

Tabel Rincian Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Kode	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/(Turun)	%
81010307	Beban Honorarium	120.168.000,00	115.278.000,00	4.890.000,00	4,24%
81010308	Beban Jasa Pengelolaan BMD	7.000.000,00	14.300.000,00	(7.300.000,00)	-51,05%
Jumlah		127.168.000,00	129.578.000,00	(2.410.000,00)	-1,86%

Tabel Rincian Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Kode	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/(Turun)	%
810103070001	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	87.258.000,00	105.030.000,00	(17.772.000,00)	-16,92%
810103070002	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	32.910.000,00	10.248.000,00	22.662.000,00	221,14%
810103080002	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	7.000.000,00	14.300.000,00	(7.300.000,00)	-51,05%
Jumlah		127.168.000,00	129.578.000,00	(2.410.000,00)	-1,86%

Tabel Beban Barang dan Jasa

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/(Turun)	%
8102	Beban Barang dan Jasa	1.670.704.718,00	1.850.061.691,00	(179.356.973,00)	-9,69%

Nilai Beban Barang dan Jasa pada tahun 2023 sebesar Rp1.670.704.718,00 mengalami penurunan sebesar Rp179.356.973,00 atau 9,69% jika dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp1.850.061.691,00

Tabel Rincian Beban Barang dan Jasa

Kode	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/(Turun)	%
810201	Beban Barang	197.903.206,00	259.934.048,00	(62.030.842,00)	-23,86%
810202	Beban Jasa	1.050.844.535,00	978.075.786,00	72.768.749,00	7,44%
810203	Beban Pemeliharaan	248.236.017,00	468.301.657,00	(220.065.640,00)	-46,99%
810204	Beban Perjalanan Dinas	173.720.960,00	143.750.200,00	29.970.760,00	20,85%
Jumlah		1.670.704.718,00	1.850.061.691,00	(179.356.973,00)	-9,69%

Tabel Beban Barang

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/(Turun)	%
810201	Beban Barang	197.903.206,00	259.934.048,00	(62.030.842,00)	-23,86%

Nilai Beban Barang pada tahun 2023 sebesar Rp197.903.206,00 mengalami penurunan sebesar Rp62.030.842,00 atau 23,86% jika dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp259.934.048,00

Tabel Rincian Beban Barang

Kode	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/(Turun)	%
810201010001	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	14.269.000,00	0,00	14.269.000,00	0,00%
810201010004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	79.215.926,00	90.142.758,00	(10.926.832,00)	-12,12%
810201010024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	18.860.260,00	31.947.200,00	(13.086.940,00)	-40,96%
810201010025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	8.365.970,00	17.054.140,00	(8.688.170,00)	-50,94%
810201010027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	750.000,00	1.800.000,00	(1.050.000,00)	-58,33%
810201010029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.897.200,00	8.929.000,00	(4.031.800,00)	-45,15%
810201010030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	6.080.600,00	12.008.450,00	(5.927.850,00)	-49,36%
810201010031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	7.028.000,00	4.372.500,00	2.655.500,00	60,73%
810201010036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	250.000,00	10.545.000,00	(10.295.000,00)	-97,63%
810201010052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	51.816.250,00	83.135.000,00	(31.318.750,00)	-37,67%
810201010076	Beban Pakaian Olahraga	6.370.000,00	0,00	6.370.000,00	0,00%
Jumlah		197.903.206,00	259.934.048,00	(62.030.842,00)	-23,86%

Tabel Beban Jasa

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/(Turun)	%
810202	Beban Jasa	1.050.844.535,00	978.075.786,00	72.768.749,00	7,44%

Nilai Beban Jasa pada tahun 2023 sebesar Rp1.050.844.535,00 mengalami kenaikan sebesar Rp72.768.749,00 atau 7,44% jika dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp978.075.786,00

Tabel Rincian Beban Jasa

Kode	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/(Turun)	%
81020201	Beban Jasa Kantor	1.047.344.535,00	940.662.744,00	106.681.791,00	11,34%
81020204	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	3.500.000,00	5.395.000,00	(1.895.000,00)	-35,13%
81020208	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	19.478.042,00	(19.478.042,00)	-100,00%
81020212	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0,00	12.540.000,00	(12.540.000,00)	-100,00%
Jumlah		1.050.844.535,00	978.075.786,00	72.768.749,00	7,44%

Tabel Rincian Beban Jasa

Kode	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/(Turun)	%
810202010003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	175.500.000,00	91.850.000,00	83.650.000,00	91,07%
810202010004	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	54.000.000,00	0,00	54.000.000,00	0,00%
810202010016	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	0,00%
810202010017	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	186.223.840,00	186.403.840,00	(180.000,00)	-0,10%
810202010026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	137.166.816,00	149.123.072,00	(11.956.256,00)	-8,02%
810202010030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	183.218.396,00	211.891.166,00	(28.672.770,00)	-13,53%
810202010031	Beban Jasa Tenaga Keamanan	37.312.768,00	37.280.768,00	32.000,00	0,09%
810202010059	Beban Tagihan Telepon	449.494,00	448.210,00	1.284,00	0,29%
810202010060	Beban Tagihan Air	13.193.000,00	9.218.200,00	3.974.800,00	43,12%
810202010061	Beban Tagihan Listrik	71.745.921,00	62.020.289,00	9.725.632,00	15,68%
810202010062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00%
810202010063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	180.720.600,00	186.701.499,00	(5.980.899,00)	-3,20%
810202010067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.053.700,00	4.165.700,00	(2.112.000,00)	-50,70%
810202040123	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.500.000,00	4.400.000,00	(900.000,00)	-20,45%
810202040463	Beban Sewa Alat Peraga Pelatihan	0,00	995.000,00	(995.000,00)	-100,00%

810202080008	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	0,00	12.465.772,00	(12.465.772,00)	- 100,00%
810202080021	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	0,00	7.012.270,00	(7.012.270,00)	- 100,00%
810202120003	Beban Bimbingan Teknis	0,00	12.540.000,00	(12.540.000,00)	- 100,00%
Jumlah		1.050.844.535,00	978.075.786,00	72.768.749,00	7,44%

Tabel Beban Pemeliharaan

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/(Turun)	%
810203	Beban Pemeliharaan	248.236.017,00	468.301.657,00	(220.065.640,00)	-46,99%

Nilai Beban Pemeliharaan pada tahun 2023 sebesar Rp248.236.017,00 mengalami penurunan sebesar Rp220.065.640,00 atau 46,99% jika dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp468.301.657,00

Tabel Rincian Beban Pemeliharaan

Kode	Uraian	Tahun	Tahun -1	Naik/(Turun)	%
81020301	Beban Pemeliharaan Tanah	0,00	118.104.000,00	(118.104.000,00)	- 100,00%
81020302	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	101.607.296,00	97.019.275,00	4.588.021,00	4,73%
81020303	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	54.800.665,00	(54.800.665,00)	- 100,00%
81020304	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	14.818.500,00	198.377.717,00	(183.559.217,00)	-92,53%
81020305	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	131.810.221,00	0,00	131.810.221,00	0,00%
Jumlah		248.236.017,00	468.301.657,00	(220.065.640,00)	-46,99%

Tabel Rincian Beban Pemeliharaan

Kode	Uraian	Tahun	Tahun -1	Naik/(Turun)	%
810203010017	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga	0,00	118.104.000,00	(118.104.000,00)	-100,00%
810203020022	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set	6.904.000,00	0,00	6.904.000,00	0,00%
810203020035	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	27.774.348,00	21.418.275,00	6.356.073,00	29,68%
810203020037	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	19.999.400,00	12.975.000,00	7.024.400,00	54,14%
810203020102	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya	0,00	795.000,00	(795.000,00)	-100,00%
810203020121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	15.660.000,00	14.850.000,00	810.000,00	5,45%
810203020404	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	14.992.548,00	0,00	14.992.548,00	0,00%
810203020405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	12.237.000,00	38.903.000,00	(26.666.000,00)	-68,54%
810203020409	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	4.040.000,00	8.078.000,00	(4.038.000,00)	-49,99%
810203030001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	54.800.665,00	(54.800.665,00)	-100,00%
810203040035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	0,00	178.477.717,00	(178.477.717,00)	-100,00%
810203040126	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	14.818.500,00	19.900.000,00	(5.081.500,00)	-25,54%
810203050057	Beban Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	131.810.221,00	0,00	131.810.221,00	0,00%
Jumlah		248.236.017,00	468.301.657,00	(220.065.640,00)	-46,99%

Tabel Beban Perjalanan Dinas

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/(Turun)	%
810204	Beban Perjalanan Dinas	173.720.960,00	143.750.200,00	29.970.760,00	20,85%

Nilai Beban Perjalanan Dinas pada tahun 2023 sebesar Rp173.720.960,00 mengalami kenaikan sebesar Rp29.970.760,00 atau 20,85% jika dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp143.750.200,00

Tabel Rincian Beban Perjalanan Dinas

Kode	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/(Turun)	%
810204010001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	142.915.960,00	66.410.200,00	76.505.760,00	115,20%
810204010002	Beban Perjalanan Dinas Tetap	0,00	9.720.000,00	(9.720.000,00)	-100,00%
810204010003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	30.805.000,00	67.620.000,00	(36.815.000,00)	-54,44%
Jumlah		173.720.960,00	143.750.200,00	29.970.760,00	20,85%

Tabel Beban Penyusutan Dan Amortisasi

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/(Turun)	%
82	Beban Penyusutan Dan Amortisasi	228.517.488,14	200.260.778,51	28.256.709,63	14,11%

Nilai Beban Penyusutan Dan Amortisasi pada tahun 2023 sebesar Rp228.517.488,14 mengalami kenaikan sebesar Rp28.256.709,63 atau 14,11% jika dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp200.260.778,51

Tabel Rincian Beban Penyusutan Dan Amortisasi

Kode	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/(Turun)	%
8201	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	159.629.968,63	131.373.259,00	28.256.709,63	21,51%
8202	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	66.283.539,51	66.283.539,51	0,00	0,00%
8203	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.603.980,00	2.603.980,00	0,00	0,00%
Jumlah		228.517.488,14	200.260.778,51	28.256.709,63	14,11%

Tabel Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/(Turun)	%
8201	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	159.629.968,63	131.373.259,00	28.256.709,63	21,51%

Nilai Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin pada tahun 2023 sebesar Rp159.629.968,63 mengalami kenaikan sebesar Rp28.256.709,63 atau 21,51% jika dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp131.373.259,00

Tabel Rincian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Kode	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/(Turun)	%
820101	Beban Penyusutan Alat Besar	9.956.400,00	8.544.900,00	1.411.500,00	16,52%
820102	Beban Penyusutan Alat Angkutan	24.810.209,63	0,00	24.810.209,63	0,00%
820105	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	39.607.900,00	37.612.900,00	1.995.000,00	5,30%
820106	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	5.977.600,00	18.587.600,00	(12.610.000,00)	-67,84%
820107	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	13.959.440,00	13.959.440,00	0,00	0,00%
820110	Beban Penyusutan Komputer	65.318.419,00	52.668.419,00	12.650.000,00	24,02%
Jumlah		159.629.968,63	131.373.259,00	28.256.709,63	21,51%

Tabel Beban Penyusutan Alat Besar

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/(Turun)	%
820101	Beban Penyusutan Alat Besar	9.956.400,00	8.544.900,00	1.411.500,00	16,52%

Nilai Beban Penyusutan Alat Besar pada tahun 2023 sebesar Rp9.956.400,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.411.500,00 atau 16,52% jika dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp8.544.900,00

Tabel Beban Penyusutan Alat Angkutan

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/(Turun)	%
820102	Beban Penyusutan Alat Angkutan	24.810.209,63	0,00	24.810.209,63	0,00%

Nilai Beban Penyusutan Alat Angkutan pada tahun 2023 sebesar Rp24.810.209,63 mengalami kenaikan sebesar Rp24.810.209,63 atau 100,00% jika dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp0,00

Tabel Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/(Turun)	%
820105	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	39.607.900,00	37.612.900,00	1.995.000,00	5,30%

Nilai Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga pada tahun 2023 sebesar Rp39.607.900,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.995.000,00 atau 5,30% jika dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp37.612.900,00

Tabel Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/(Turun)	%
820106	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	5.977.600,00	18.587.600,00	(12.610.000,00)	-67,84%

Nilai Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar pada tahun 2023 sebesar Rp5.977.600,00 mengalami penurunan sebesar Rp12.610.000,00 atau 67,84% jika dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp18.587.600,00

Tabel Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/(Turun)	%
820107	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	13.959.440,00	13.959.440,00	0,00	0,00%

Nilai Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan pada tahun 2023 sebesar Rp13.959.440,00 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 100,00% jika dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp13.959.440,00

Tabel Beban Penyusutan Komputer

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/(Turun)	%
820110	Beban Penyusutan Komputer	65.318.419,00	52.668.419,00	12.650.000,00	24,02%

Nilai Beban Penyusutan Komputer pada tahun 2023 sebesar Rp65.318.419,00 mengalami kenaikan sebesar Rp12.650.000,00 atau 24,02% jika dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp52.668.419,00

Tabel Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/(Turun)	%
8202	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	66.283.539,51	66.283.539,51	0,00	0,00%

Nilai Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan pada tahun 2023 sebesar Rp66.283.539,51 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 100,00% jika dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp66.283.539,51

Tabel Rincian Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Kode	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/(Turun)	%
820201	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	64.675.539,51	64.675.539,51	0,00	0,00%
820204	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.608.000,00	1.608.000,00	0,00	0,00%
Jumlah		66.283.539,51	66.283.539,51	0,00	0,00%

Tabel Beban Penyusutan Bangunan Gedung

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/(Turun)	%
820201	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	64.675.539,51	64.675.539,51	0,00	0,00%

Nilai Beban Penyusutan Bangunan Gedung pada tahun 2023 sebesar Rp64.675.539,51 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 100,00% jika dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp64.675.539,51

Tabel Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/(Turun)	%
820204	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.608.000,00	1.608.000,00	0,00	0,00%

Nilai Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti pada tahun 2023 sebesar Rp1.608.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 100,00% jika dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp1.608.000,00

Tabel Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/(Turun)	%
8203	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.603.980,00	2.603.980,00	0,00	0,00%

Nilai Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi pada tahun 2023 sebesar Rp2.603.980,00 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 100,00% jika dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp2.603.980,00

Tabel Rincian Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Kode	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/(Turun)	%
820303	Beban Penyusutan Instalasi	2.095.980,00	2.095.980,00	0,00	0,00%
820304	Beban Penyusutan Jaringan	508.000,00	508.000,00	0,00	0,00%
Jumlah		2.603.980,00	2.603.980,00	0,00	0,00%

Tabel Beban Penyusutan Instalasi

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/(Turun)	%
820303	Beban Penyusutan Instalasi	2.095.980,00	2.095.980,00	0,00	0,00%

Nilai Beban Penyusutan Instalasi pada tahun 2023 sebesar Rp2.095.980,00 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 100,00% jika dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp2.095.980,00

Tabel Beban Penyusutan Jaringan

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/(Turun)	%
820304	Beban Penyusutan Jaringan	508.000,00	508.000,00	0,00	0,00%

Nilai Beban Penyusutan Jaringan pada tahun 2023 sebesar Rp508.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 100,00% jika dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp508.000,00

4.4 Penjelasan Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Uraian LPE	2023
EKUITAS AWAL	3,744,794,840.98
SURPLUS/DEFISIT LO	(4,399,937,333.14)
RK PPKD	4,302,608,727.00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	0.00
KOREKSI NILAI PIUTANG	0.00
KOREKSI NILAI PENYISIHAN PIUTANG	0.00
KOREKSI BEBAN DIBAYAR DIMUKA	0.00
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0.00
KOREKSI INVESTASI & DANA CADANGAN	0.00
KOREKSI ASET TETAP	0.00
KOREKSI ASET TAK BERWUJUD	0.00
KOREKSI ASET LAIN LAIN	0.00
KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP	0.00
KOREKSI AMORTISASI	0.00
KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAIN LAIN	0.00
KOREKSI PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA	0.00
KOREKSI UTANG	0.00
RK SKPD	0.00
EKUITAS AKHIR	3,647,466,234.84

Uraian LPE	2023
EKUITAS AWAL	3.744.794.840,98

Nilai EKUITAS AWAL pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 masing-masing sebesar 3.744.794.840,98 dan Rp0 . Nilai EKUITAS AWAL Tahun 2023 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp.0 atau 0% apabila dibandingkan ekuitas awal Tahun 2022

Uraian LPE	2023
SURPLUS/DEFISIT LO	(4.399.937.333,14)

Nilai SURPLUS/DEFISIT LO pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 masing-masing sebesar -4.399.937.333,14 dan Rp0 . Nilai SURPLUS/DEFISIT LO Tahun 2023 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp.0 atau 0% apabila dibandingkan ekuitas awal Tahun 2022

Uraian LPE	2023
RK PPKD	4.302.608.727,00

Nilai RK PPKD pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 masing-masing sebesar 4.302.608.727,00 dan Rp0 . Nilai RK PPKD Tahun 2023 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp.0 atau 0% apabila dibandingkan ekuitas awal Tahun 2022.

BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

Selain informasi keuangan sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, terdapat beberapa informasi non keuangan yang berpengaruh pada penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022, sebagai berikut:

5.1 Kondisi Internal yang Berpengaruh Pada Laporan Keuangan Tahun 2023

5.1.1 Adanya Perubahan Regulasi dan Penggunaan Aplikasi Nasional (SIPD) pada Penyusunan APBD TA 2023

Dalam rangka mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang juga dipergunakan untuk mendukung Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pemerintah Daerah menyusun dokumen rencana pembangunan daerah, dokumen rencana perangkat daerah, dan dokumen pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur yang digunakan pada tahapan:

1. Perencanaan pembangunan daerah;
2. Perencanaan anggaran daerah;
3. Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah;
4. Akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
5. Pertanggungjawaban keuangan daerah;
6. Pengawasan keuangan daerah; dan
7. Analisis informasi pemerintahan daerah lainnya.

Pemerintah Daerah tidak dapat menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur tersendiri dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan daerah menyesuaikan karakteristik daerah masing-masing.

Dalam tahapan pengelolaan keuangan daerah, salah satu dampaknya adalah adanya transaksi-transaksi keuangan yang tidak dapat teridentifikasi nomenklatur kode rekening belanja maupun pendapatannya.

Sampai dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dipergunakan sebagai dasar dalam penyusunan APBD dan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022, masih banyak nomenklatur belanja dan pendapatan daerah yang belum tersedia.

Pada sisi lain, penerapan aplikasi SIPD hanya dapat dipergunakan sampai dengan tahapan perencanaan pembangunan dan anggaran daerah. Untuk tahapan penatausahaan sampai dengan penyusunan laporan keuangan masih belum dapat digunakan secara optimal oleh Pemerintah Daerah.

5.1.2 Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Berubah pada Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo, beberapa OPD mengalami perubahan struktur organisasi dan tata kerja sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo
2. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo
3. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo
4. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo
5. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo
6. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo
7. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo
8. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo
12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo
18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo

19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo
20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo
21. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo
22. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo
23. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo
24. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo
25. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo
26. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo
27. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo
28. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Kabupaten Sidoarjo
29. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
30. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo
31. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo

BAB VI PENUTUP

Laporan Keuangan Kecamatan Jabon Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 telah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan prinsip penyajian paripurna (*full disclosure*), laporan keuangan ini telah disajikan secara penuh atas semua transaksi dan kejadian yang berpengaruh dan mempengaruhi posisi keuangan saat ini maupun yang akan datang.

Kami berharap dengan diterapkannya akuntansi berbasis akrual pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023, pengungkapan yang kami sajikan dalam laporan keuangan ini dapat lebih berguna bagi stakeholder dan seluruh pihak yang berkepentingan. Semoga Allah SWT memberikan bimbingan dan memberi ridho atas upaya yang kami lakukan untuk mewujudkan akuntabilitas dan tata kelola Pemerintah Kabupaten Sidoarjo supaya lebih baik dari sebelumnya.

Sidoarjo, 15 Januari 2024
KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN JABON

DEDIK IRWANTO, S.Sos
NIP. 19691003 198910 1 001